

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 18, 19, 20 Dan 28 Juli 2016



TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Hari : Senin
Tanggal : 18 Juli 2016
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 7 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda
Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang; dan
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan
semua undangan yang tidak dapat saya sebut satu
persatu.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin Tanggal 18 Juli 2016, kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami segenap pimpinan

dan anggota DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan Selamat Idul Fitri 1437 Hijriyah, minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan bathin, semoga puasa ramadhan dan semua amal ibadah ramadhan kita diterima Allah SWT, serta kita dapat dipertemukan kembali dengan ramadhan di tahun-tahun berikutnya. Amin Ya Robbal'alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menjelaskan bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 38 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 10.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum acara berlangsung, dapat kami sampaikan kronologi agenda pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Juni 2016 telah kami terima Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui surat Bupati Rembang Nomor : 900/1393/2016 Tanggal 28 Juni 2016 Perihal Pengiriman Raperda.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016 oleh DPRD dilaksanakan Rapat Pimpinan Gabungan DPRD dalam rangka koordinasi kegiatan DPRD bulan Juli Tahun 2016. Atas dasar Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 disepakati menjadi agenda kegiatan DPRD bulan Juli Tahun 2016.
- Dan pada tanggal 12 Juli 2016, melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang, telah ditetapkan jadwal pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, di mana rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna pertama dari empat rapat paripurna yang diagendakan.

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuk acara kedua yang merupakan acara pokok dalam rapat paripurna ini, yaitu Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Kepada Saudara Bupati Rembang, dipersilahkan.

===== *PENJELASAN BUPATI* =====

➤ (*Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 terlampir*)

Terima kasih Sdr. Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian telah kita dengar bersama penjelasan raperda yang disampaikan oleh Saudara Bupati Rembang, selanjutnya penjelasan Raperda ini akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi dengan pemandangan umumnya, yang mana penyusunannya dilaksanakan pada hari ini juga setelah selesai rapat paripurna, dan penyampaiannya dilaksanakan besok pagi Selasa tanggal 19 Juli 2016 dalam rapat paripurna kedua.

Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)


Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kesalahan saya di dalam memimpin rapat.

Sekian

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS

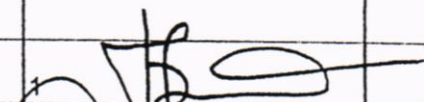
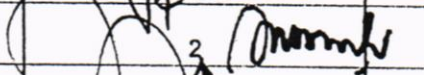


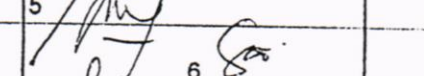
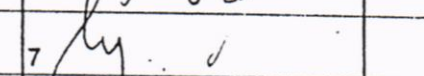
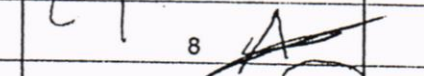
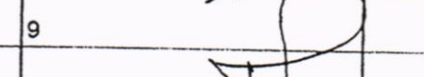
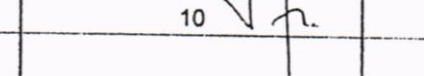

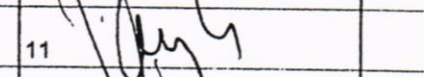
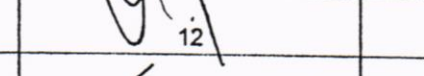

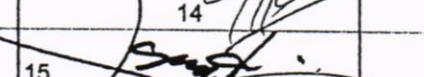
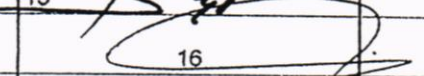
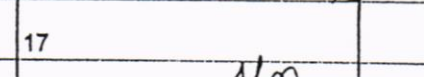
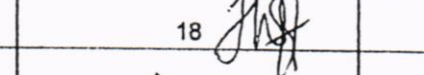


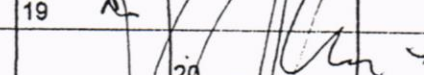
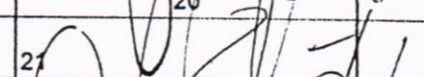
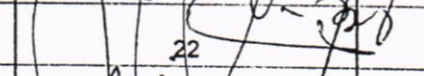

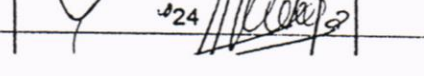


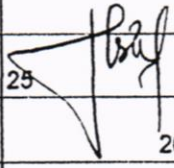
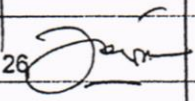
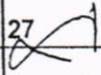
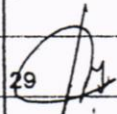
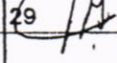
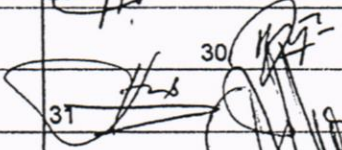







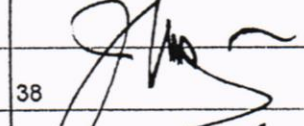



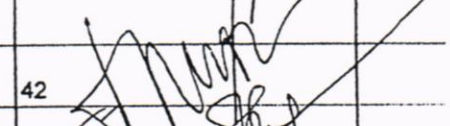

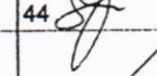
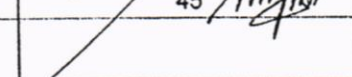
Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Bupati tentang Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2015;
- LAMPIRAN III : Pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2015;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKAIAN PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD T.A 2015
HARI/TANGGAL : SENIN, 18 JULI 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil ketua DPRD	25 	
26	JASMANI	Anggota	26 	
27	WIDODO	Anggota	27 	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28 	
29	SUMARSIH NANI K STI SUNDARI	Anggota	29 	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30 	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32 	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33 	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35 	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36 	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38 	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39 	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40 	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41 	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 	
43	NUR JANNAH	Anggota	43 	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44 	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45 	

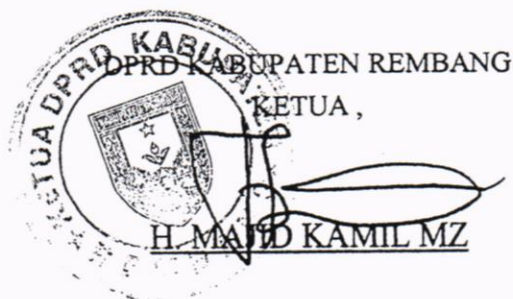
Keterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit




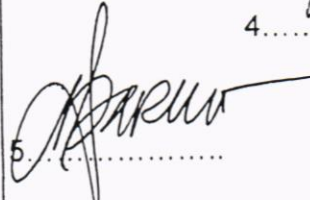
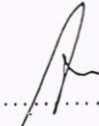
3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
 RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
 DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 JULI 2016
 PUKUL. : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	<u>BIWARTNO, SH</u>	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	<u>Bambang S</u>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<u>DARNAWAN SETIADY</u>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<u>Sugawo</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO, M.Si	Pj Sekretaris Daerah	8.



SEKRETARIAT DPRD KAB. REMBANG


 ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2015

HARI/TANGGAL : SENIN , 18 JULI 2016

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOLIH	2
3	CAMAT SUMBER	HERIJONO	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	W. Widyono	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kusudi	8
9	CAMAT LASEM	Kusuma P	9
10	CAMAT PANCUR	Juharta	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Subayno	12
13	CAMAT KRAGAN	MASHADI	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kesnanto	14

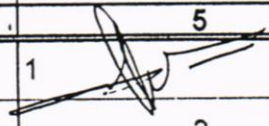

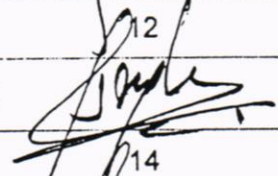
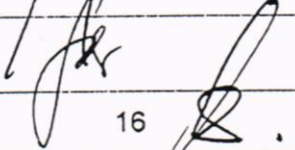

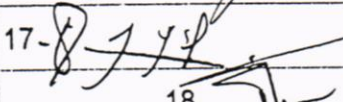
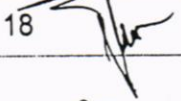
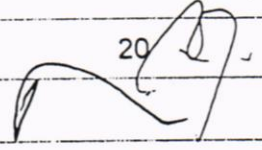
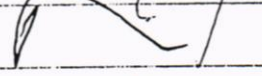
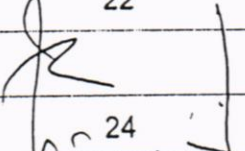
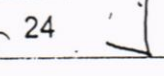
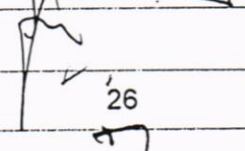
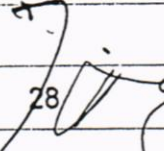
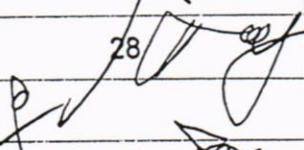
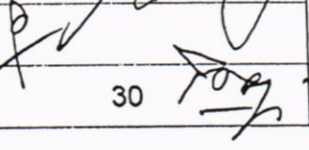
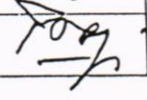


SEKRETARIS DPRD KAB REMBANG

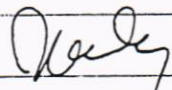
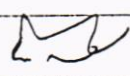



Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620304 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

HARI/TANGGAL : SENIN , 18 JULI 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Effend	BAB	1 
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gantarto		11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	ISNUGROHO		13 
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Syahrul		15 
16	BAG. UMUM	Smuel		16 
17	DPPKAD	Her Suharto		17 
18	INSPEKTORAT	B. Suniyo		18 
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Li Wahyuni H.	ku	20 
21	B K D	Suparman		21 
22	BKP & P4K			22
23	B P B D	Triyanto		23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Triyanto Ins		24 
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Sehat	25 
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Munthoh	Hadis	27 
28	DINTANHUT	Suratmin		28 
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sehat	29 
30	DINHUBKOMINFO	Faid H.	ku	30 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	ALGONDRA HS	Setda	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO		32
33	DINBUDPARPORA	SURYAWATI	Setda	33
34	DINAS ENERGI & SDM	MORFATA	Setda	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purnawati C	BLH	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Kartono	Ka.	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyarti	Ka. KPP	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Setiawan		39
40	SATPOL PP	Slamet Rajad		40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	B. Slamet Sobat		41
42	P D A M	SANURI		42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sihombing		43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	TMP. 'C'		45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J	Narah Indiche		48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	SAICHUDIN	Ka.	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85 
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93 
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95	Tony, Ali Fks			95 
96	A. MUDLICH M			96
97	Suprayanto	Suprayanto	penulis	97 
98				98
99				99
100				100

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015**
Tanggal, 18 Juli 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
 - Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
 - Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
 - Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;
 - Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.
-

Mengawali pertemuan kali ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan RidhoNya-lah kita dapat berkumpul bersama dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara **“Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan ucapan **terima kasih** dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu, pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran terakhir.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.455.130.917.329,00 (***Satu trilyun empat ratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah***) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.408.950.534.485,80 (***Satu trilyun empat ratus delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh rupiah***) atau 96,83%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.650.799.417.663,00 (***Satu trilyun enam ratus lima puluh milyar tujuh ratus***

sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) direalisasikan sebesar Rp. 1.211.257.900.367,74 (**Satu trilyun dua ratus sebelas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah)** atau 73,37%.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 206.340.500.334,00 (**Dua ratus enam milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** realisasinya sebesar Rp.209.585.690.530,55 (**Dua ratus sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh koma lima puluh lima rupiah)** atau 101,57%. Dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 10.672.000.000,00 (**Sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)** realisasinya sebesar Rp. 10.670.450.843,00 (**Sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh juta**

Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

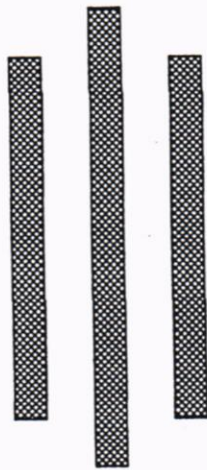
H. ABDUL HAFIDZ



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR
NOTA KEUANGAN

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2015



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 .

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.455.130.917.329,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.408.950.534.485,80 atau 96,83%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.650.799.417.663,00 realisasinya adalah sebesar Rp.1.211.257.900.367,74 atau 73,37% (merupakan jumlah antara Belanja dengan Transfer) sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.206.340.500.334,00 realisasinya sebesar Rp.209.585.690.530,55 atau 101,57% dan Pengeluaran Pembiayaan yang

direncanakan sebesar Rp.10.672.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 10.670.450.843,00 atau 99,99%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 :

URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
PENDAPATAN - LRA	1.455.130.917.329,00	1.408.950.534.485,80	96,83	1.329.587.756.593,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	184.956.739.329,00	193.122.759.856,80	104,42	179.642.187.487,27
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	37.023.000.000,00	42.306.265.606,00	114,27	38.643.241.316,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	29.756.100.500,00	32.227.998.903,00	108,31	41.529.546.666,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.429.911.000,00	4.447.117.385,00	100,39	6.183.205.661,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	113.747.727.829,00	114.141.377.962,80	100,35	93.286.193.844,27
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.268.681.888.000,00	1.215.689.423.357,00	95,82	1.149.403.847.606,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	881.908.674.000,00	852.722.349.235,00	96,69	775.863.183.184,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	25.990.000.000,00	20.707.971.300,00	79,68	26.187.778.691,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	9.802.967.000,00	10.503.522.935,00	107,15	2.694.683.493,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	723.091.447.000,00	723.091.447.000,00	100,00	700.774.721.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	123.024.260.000,00	98.419.408.000,00	80,00	46.206.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	268.637.095.000,00	268.241.945.000,00	99,85	172.399.233.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	268.637.095.000,00	268.241.945.000,00	99,85	172.399.233.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	67.809.000.000,00	84.351.397.342,00	124,40	72.995.869.203,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	67.809.000.000,00	84.351.397.342,00	124,40	72.995.869.203,00
Bantuan Keuangan - LRA	50.327.119.000,00	10.373.731.780,00	20,61	128.145.562.219,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	50.327.119.000,00	10.373.731.780,00	20,61	128.145.562.219,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	1.492.290.000,00	138.351.272,00	9,27	541.721.500,00
Pendapatan Hibah - LRA	1.492.290.000,00	138.351.272,00	9,27	541.721.500,00
BELANJA	1.482.739.304.192,00	1.049.597.949.567,74	70,79	1.240.745.611.560,06
BELANJA OPERASI	1.247.523.021.412,00	997.617.222.548,74	79,97	1.089.193.572.798,06
Belanja Pegawai	879.485.067.584,00	775.602.699.734,00	88,19	632.880.487.032,00
Belanja Barang dan Jasa	319.374.118.028,00	195.418.791.027,74	61,19	414.019.203.149,06
Belanja Bunga	37.000.000,00	7.985.987,00	21,58	14.340.417,00
Belanja Hibah	43.331.165.800,00	23.873.745.800,00	55,10	39.727.269.200,00
Belanja Bantuan Sosial	5.295.670.000,00	2.714.000.000,00	51,25	2.552.273.000,00
BELANJA MODAL	234.216.282.780,00	51.980.727.019,00	22,19	151.454.913.762,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		521.915.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.129.476.541,00	28.577.303.484,00	66,26	30.362.332.519,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.593.660.384,00	6.570.364.200,00	8,81	44.216.272.531,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.219.945.855,00	15.593.995.535,00	14,02	74.413.567.612,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.273.200.000,00	1.239.063.800,00	23,50	1.940.826.100,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	97.125.000,00
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	97.125.000,00
TRANSFER	168.060.113.471,00	161.659.950.800,00	96,19	35.163.035.000,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	6.157.224.400,00	6.157.224.400,00	100,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.620.300.000,00	3.620.300.000,00	100,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.536.924.400,00	2.536.924.400,00	100,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	161.902.889.071,00	155.502.726.400,00	96,05	35.163.035.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	160.811.933.400,00	154.816.933.400,00	96,27	34.200.150.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.090.955.671,00	685.793.000,00	62,86	962.885.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(195.668.500.334,00)	197.692.634.118,06	(101,03)	53.679.110.033,21
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	206.340.500.334,00	209.585.690.530,55	101,57	167.066.868.874,34
Penggunaan SILPA	206.340.500.334,00	209.585.690.530,55	101,57	167.066.868.874,34

URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.672.000.000,00	10.670.450.843,00	99,99	11.162.450.842,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.617.000.000,00	10.617.000.000,00	100,00	11.109.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	55.000.000,00	53.450.843,00	97,18	53.450.842,00
PEMBIAYAAN NETTO	195.668.500.334,00	198.915.239.687,55	101,66	155.904.418.032,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	396.607.873.805,61	0,00	209.583.528.065,55

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang. Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih sempurna.

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juli 2016
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
 3. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. SEKRETARIS RAPAT
1. Nama : Drs. LATO' IFULMINAN
 2. Jabatan : Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 37 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 0 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 8 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang sayahormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang, dan
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua
undangan lainnya.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan berkah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna II (kedua) DPRD membahas Raperdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dengan agenda pokok penyampaian pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan syah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 37 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Dengan mengucapkan ” *Bismillahirrohmaanirrohiim* ” Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Agar di dalam penyampaiannya dapat berjalan tertib, kepada Saudara- saudara yang ditunjuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muhammad Anshori
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muhammad Imron
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Ali Ircham, S.T.
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. H. Chasanuddin
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Gatot Paeran, S.H. M.Si.
7. Fraksi Harapan : Sdri. Paramita Prapanca ANR

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

=== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ===

➤ *(Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara dalam rapat paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna ini. Untuk rapat paripurna ketiga dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, akan dilaksanakan besok pagi Rabu tanggal 20 Juli 2016. Sehubungan dengan padatnya acara, dimana selain rapat paripurna ketiga terdapat dua agenda lagi yang harus dilaksanakan yakni Rapat Banggar dan TAPD serta Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi, maka kami mohon kepada Saudara-saudara untuk dapat hadir tepat waktu.

Selanjutnya, dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil 'alamin*" tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

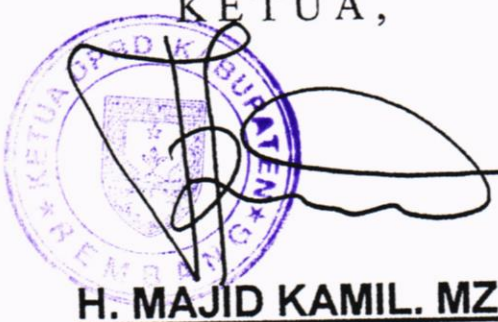
(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A ,



H. MAJID KAMIL. MZ

An. SEKRETARIS DPRD
Kabag. Keangangan



Drs. LATO' IFUL MINAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630306 199110 1 001

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2015.

RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKAIAN PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015
HARI/TANGGAL : SELASA, 19 JULI 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	✓
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	NUR JANNAH	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	45	

eterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit


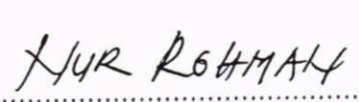

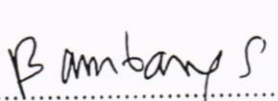




3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

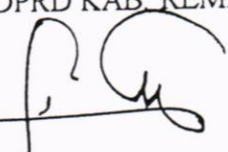


DAFTAR HADIR FORKOMFINDA
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015

HARI/TANGGAL : SELASA , 19 JULI 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E	Wakil Bupati Rembang	2.
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO. M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	8. 

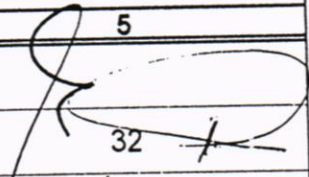
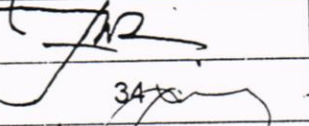
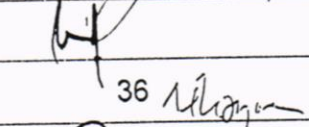
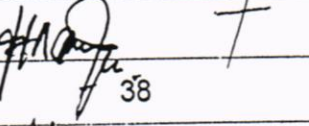
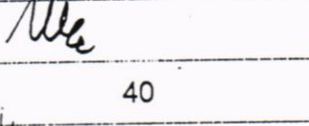
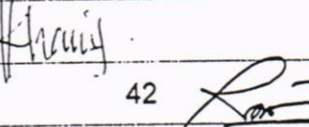
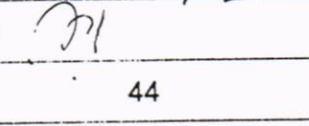
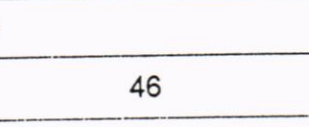
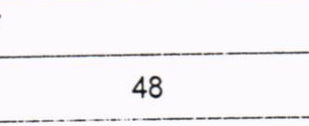
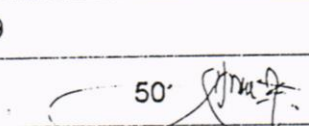
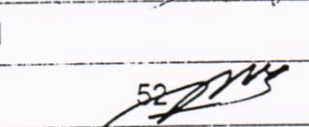
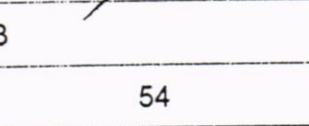
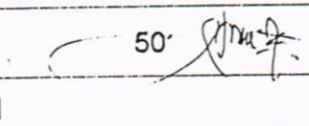
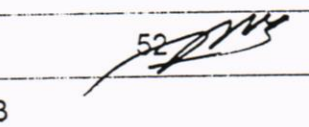


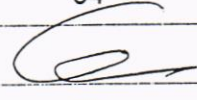
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

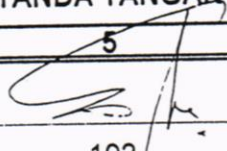
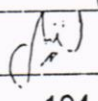
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015**

HARI/TANGGAL : SELASA , 19 JULI 2016
PUKUL : 10.00 WIB

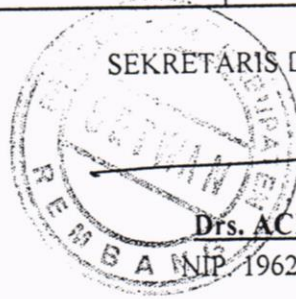
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	1 W
2	STAF AHLI BUPATI	Nur effendi	SAB	2 f
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Aleksandra		8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	WMAW RW		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sup Anwar	Wes	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Pri Lati H		15
16	BAG. UMUM	Engingati - IWR Subhuti	Sup Umum	16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT	B Suryanto	Insamir!	18
19	BAPPEDA	Drupoto	Sekretaris	19
20	BPMPKB	NGAT III	SECRET	20
21	B K D	SupARMIT		21
22	BKP & P4K	Nur Hidayati	Kesult. Kesu	22
23	B P B D			23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Trupoto	Selit	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyus utom	Sebet	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Mugriho TH.	Premanan.	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Suratwin		28
29	DINLUTKAN			29
30	DINHUBKOMINFO	Farid M.	kesu	30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	KU Giron	Manly	31 
32	DINSOSNAKERTRANS	Dan Untopo	Ketel Paguyonan	32 
33	DINBUDPARPORA	SURYAWAN	Sh	33 
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryasa	Ensi	34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purnomo Sun	BCU	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTOHU	Ka	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Suniana	Ka Subbag IV	37 
38	KANTOR PPT			38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Setyohar	Direktur	39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	Hidayat F	Mendukung	41 
42	P D A M	Rochmad Spadi	PDM	42 
43	PERCETAKAN DAERAH	Koeskarnain		43 
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	Iri Mulyani	Gara Binraya	50 
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	SAICHUDIN	Ka	52 
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		Agus W	TA Fkp	95 
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
101	Nurdaman	Daryono		101 
102	Jamal Azli	Jamal Azli		102
103	koelim	Agus		103 
104				104
105				105

SEKRETARIS DIRD KAB. REMBANG

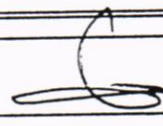



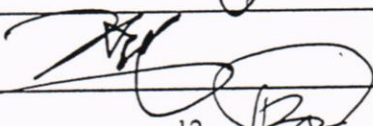
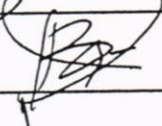
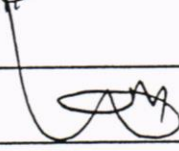


Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011


DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015

HARI/TANGGAL : SELASA , 19 JULI 2016
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	<i>H. Asem Soem</i>	1 
2	CAMAT KALIORI	<i>MUSTHOCH</i>	2 
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	<i>SIKSIANTORO</i>	5 
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	<i>Induk</i>	10 
11	CAMAT SEDAN	<i>Lowanta</i>	11 
12	CAMAT SLUKE	<i>Subarno</i>	12 
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	<i>Eddy Dewanto</i>	14 

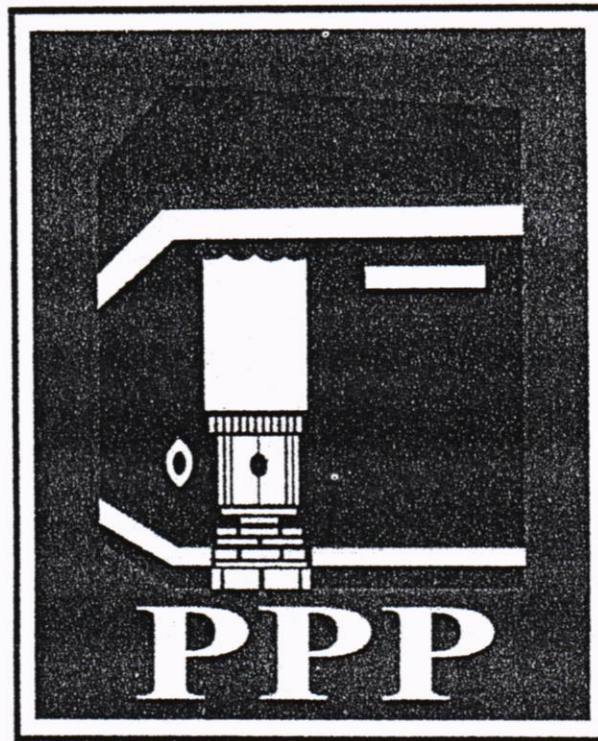


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN DPRD KAB. REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SELASA
Tanggal : 19 JULI 2016
Dibacakan Oleh : MOHAMMAD ANSHORI



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Selasa, 19 Juli 2016

Dibacakan oleh : M. ANSORI, SH

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....
Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. PJ. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati , Pimpinan sidang, dan segenap Sidang Dewan, yang kami Hormati...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2015, yang Nota Keuangannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati , pada rapat paripurna Senin, tanggal 18 Juli 2016, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, meskipun masih banyak hal yang masih belum memenuhi harapan masyarakat luas.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, dan kebetulan masih di dalam bulan Syawal, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan selamat l'dul Fitri mohon maaf lahir dan bathin , atas semua kesalahan dan khilaf yang ada , selama kita berinteraksi baik didalam kedinasan maupun kekeluargaan.

Sdr. Bupati , Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Sehubungan dengan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ini , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, sesuai tugas pokok dan fungsi DPRD, untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang , menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja daerah , yang direncanakan sebesar **Rp. 1.650.799.417.663,00 (Satu trilyun, Enam ratus lima puluh milyar, tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta, empat ratus tujuh belas ribu, enam ratus enam puluh tiga rupiah)**. Direalisasikan sebesar **Rp. 1.211.257.900.367,74 (Satu trilyun, Dua ratus sebelas milyar, dua ratus lima puluh tujuh juta, Sembilan ratus ribu, tiga ratus enam puluh tujuh rupiah, tujuh puluh empat sen)** atau **73,37 %** . Jadi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 terjadi SILPA yang sangat tinggi, yakni **26,63 %**. Situasi dan kondisi penilaian yang buruk dan sangat memprihatinkan ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan minta, agar sdr. Bupati melakukan langkah-langkah srategi, memerintahkan pada jajaran SKPD, untuk meningkatkan kinerja yang lebih serius demi kesejahteraan Rembang tercinta, agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat jauh lebih baik, sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Sehubungan dengan optimalisasi pendapatan dari pos kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu mengoptimalkan kinerja BUMD terutama PT. RBSJ, yang sampai saat ini tidak jelas kontribusinya kepada Pemkab, minta agar Pemkab Rembang segera melakukan perombakan kepengurusan dengan melaksanakan RUPS, karena melalui RUPS itulah kinerja Perusahaan tersebut dapat dievaluasi sehat dan tidaknya.
3. Berkenaan dengan pelaksanaan Perbaikan Jembatan Palan di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi, menurut hemat dan pengamatan kami, pelaksanaannya **sangat lambat**, padahal untuk jalan alternative menggunakan **jalan desa**, dan hal ini sangat mengganggu keamanan lingkungan, dan kelancaran aktifitas perekonomian masyarakat desa setempat, untuk itu kami minta, agar sdr. Bupati memberikan teguran atau melakukan pemanggilan kepada dinas terkait (Kepala Balai Pelaksana teknis PU Bina Marga Pati) untuk diminta **penjelasan tentang percepatan** pelaksanaan Pekerjaan Jembatan tersebut.
4. Sehubungan dengan ruas jalan Pamotan – Clangapan Rembang, yang status sekarang **jalan Kabupaten**, untuk mengurangi beban Pemkab Rembang, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **mengusulkan**, agar Ruas jalan tersebut diajukan statusnya **menjadi Jalan Propinsi**, karena ruas jalan Lasem – Sale/batas Jatim, sudah status Jalan kewenangan Pemerintah Propinsi. Hal ini penting karena Pemkab Rembang, masih banyak sekali infra struktur yang harus ditangani, terutama sarana perhubungan, jalan antar kecamatan, juga antar desa di pinggiran, yang harus dilakukan perbaikan maupun peningkatan.
5. Berkaitan dengan sering munculnya aduan dari masyarakat sekitar pantai, juga melalui LSM, tentang gangguan/pencemaran lingkungan dan air laut, akibat dari limbah perusahaan pengolah ikan, kami Fraksi PPP minta, agar sdr. Bupati menginstruksikan pada dinas / SKPD terkait, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap operasinya Perusahaan tersebut, agar limbahnya tetap terjaga tidak menimbulkan pencemaran yang meresahkan masyarakat.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Raperda Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Dan akhirnya mari kita selalu mohon pada ALLAH SWT, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas , sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan membawa manfaat untuk masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamittorik.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 19 Juli 2016

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO

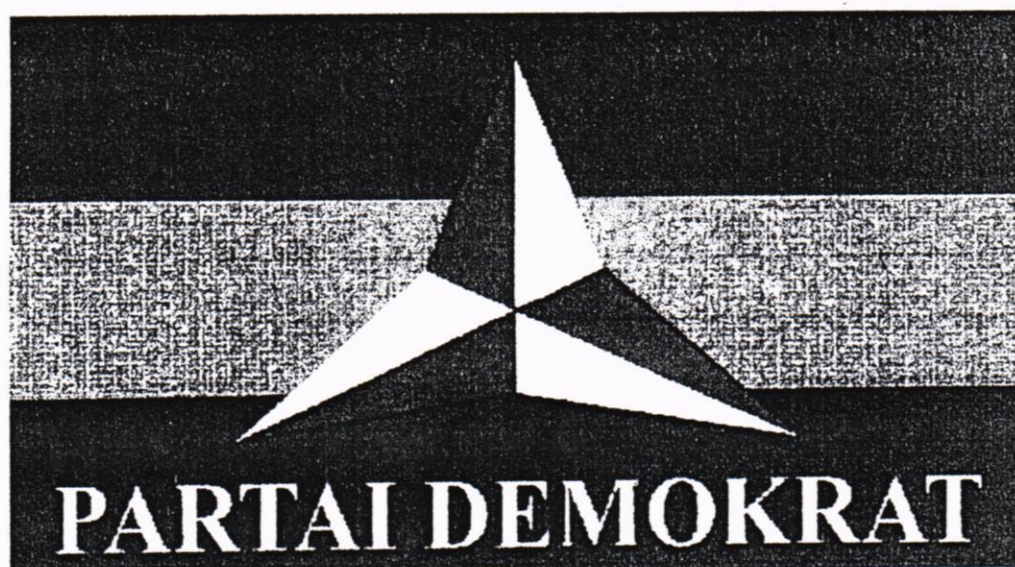


SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2015**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 19 Juli 2016

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2015

SELASA, 19 JULI 2016

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan innayahNya karena Kita masih diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini

Sebelumnya Kami Fraksi Demokrat mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 syawal 1437 H mohon maaf lahir dan bathin, Semoga bulan syawal ini dapat membawa berkah bagi kita semua, amiin.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Demokrat ini, Kami Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan anggaran tahun 2015, kita sangat paham dan mengerti persoalan persoalan terkait dengan pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2015 yang dimualai dari awal tahun 2014 sampai dengan awal 2016 tidak memiliki bupati definitif sehingga bagai kapal tanpa nahkoda. Sehingga permasalahan permasalahan yang muncul sangat banyak dan beragam , bahkan berakibat tidak jalanya hampir seluruh program kegiatan tahun 2015. Ini dibuktikan dengan SILPA yang sangat fantastis kurang lebih sebesar 395 milyar. Dengan silpa yang sebesar ini andaikan kegiatan dilaksanakan multi efek perekonomian rembang tidak lesu seperti ini, mulai dari pekerja kasar, tukang, toko bangunan, pemilik truk, sampai dengan usaha foto copy dan warung makan dan juga berimbas pada perbankan banyak kredit yang macet. Ini tidak akan terjadi apabila para SKPD pengampu kegiatan bisa bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, satu contoh kepala dinas pekerjaan umum kab. Rembang beberapa kali tidak mengindahkan undangan (MANGKIR) rapat kerja dengan komisi C DPRD kab. Rembang. .

Kami fraksi demokrat melihat bahwa para SKPD tidak mau bekerja karena **takut dan tidak ada yang ditakuti**, kami ibaratkan seorang anak yang sudah mantab masuk menjadi anggota TNI tetapi disaat akan di tugaskan ke Acah apa Papua menolak dengan alasan takut terancam nyawanya. Sehingga mau hakinya tidak mau kewajibanya

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Dengan momen lebaran ini marilah bersama sama kita bangkit demi masyarakat kabupaten rembang yang kita cintai ini sehingga masalah tahun 2015 tidak terulang di tahun yang akan datang.

Kami Fraksi Demokrat juga ada beberapa saran, masukan dan minta penjelasan terkait :

1. Terkait Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 168.398.839.265,-, Belanja Honorarium PNS Sebesar Rp. 46.477.736.171,- Belanja honorarium Non PNS Sebesar Rp. 34.433.169.217 dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp. 32.888.255.269. apakah semua itu tidak pemborosan karena sudah ada TPP masih juga ada honor yang sama sama tingginya. Dan belanja pegawai BLUD sebesar itu dipakai bayar apa, siapa.?
2. Diharap kepada Pemerintah Khususnya Dinas terkait supaya pembelian beras dari petani ditingkatkan dan harganya (HPP) nya dinaikkan supaya mutu beras raskin yang sampai kemasyarakat baik dan dapat dikonsumsi, karena yang dikonsumsi rakyat miskin selama ini adalah beras raskin
3. Untuk bidang pertanian, kami berharap pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Rembang supaya membangun embung-embung yang baru dan menormalisasi embung-embung yang sudah ada, irigasi-irigasi untuk menambah daya tampungnya dan juga sumur sumur pertanian sehingga masyarakat tidak mengalami puso seperti tahun ini
4. Mengenai Pasar Kota Rembang, Dimohon Kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya ditata, karena tiap pagi pasar kota selalu semrawut dan parkir tidak beraturan ditambah dokar yang parkir sembarangan,

pasar kota ini merupakan wajah dari kota Rembang jadi perlu penataan yang baik dan juga untuk pasar-pasar tradisional di Kabupaten Rembang supaya infrastrukturnya diperbaiki

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, mohon maaf apabila ada kata kata yang salah ataupun menyinggung karena niat kami hanya untuk kemajuan rembang Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih,

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 19 Juli 2016

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, SE., MH.

Hj. HIKMAH PURNAMAWATI / Stj.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA PERTANTUNJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015**

disampaikan oleh Muhammad Imron
pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, Senin, 19 Juli 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini perkenankan kami menyampaikan *Ja'alanallahu minal 'aidin wal faizin kullu 'aamiin wa antum bilkhoir*, Mohon Maaf Lahir Batin atas segala khilaf dan salah yang kami sengaja atau tidak kami sengaja. Spirit 'idul fitri atas keberanian meminta maaf atas kesalahan ini mudah mudahan dapat kita sampaikan bukan hanya pada saat lebaran saja, tetapi juga sekaligus saat kita berbuat khilaf atau salah.

Keberanian menyatakan permohonan maaf mengandung konsekuensi tidak akan mengulangi lagi, dan akan berhiyar untuk menjadi lebih baik. Dengan spirit seperti inilah kita bisa membangun Rembang lebih baik dari yang kemaren.

Dan kami FPKB mengucapkan SELAMAT HARI JADI REMBANG yang ke 275 yang akan kita peringati tgl 27 Juli 2016

Semoga Rembang tetap BANGKIT dan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Sidang Yang Kami Hormati

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati dalam Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD tahun 2015 ini, bahwa untuk realisasi Pendapatan terpenuhi

96,83% atau tidak tercapai sekitar 8 miliar, Sedangkan untuk Belanja terealisasi sebesar 73,37%, sementara pembiayaan realisasinya melebihi perencanaan yang mencapai 101,57%.

Dalam forum yang mulia ini, mari kita bersama sama menyamakan persepsi agar Belanja Daerah yang menjadi inti pelaksanaan pembangunan di Rembang ini dapat memenuhi capaian yang wajar. Realisasi Belanja yang hanya mencapai 73,37% menunjukkan kinerja birokrasi di Rembang kurang profesional.

Apalagi dalam sajian nota pengantar ada perbedaan angka antara catatan tertulis dengan Rencana Belanja sebesar 1.650.799.417,883 dengan realisasi sebesar 1.211.257.900.367,74 (73,37%) sementara dalam tabel yang disajikan tercatat Anggaran 1.482.739.304.192,00 dengan realisasi 1.049.597.949.567,74 (70,79%).

(Mohon Maaf) Capaian Belanja ini juga kurang proporsional karena Belanja operasinya mencapai 79,97%, sementara Belanja Modal yang merepresentasikan pembangunan untuk masyarakat hanya terealisasi sebesar 22,19%. Birokrasi hanya berani mengambil "enaknya" tetapi tidak berani mengambil resiko yang sesungguhnya jika memenuhi prosedur dan regulasi akan meminimalisir resiko resiko.

Patut kiranya, setelah Bupati memberikan kartu merah kepada PNS yang tidak disiplin, sekarang saatnya memberikan kartu merah kepada SKPD yang serapan kegiatannya minim. Bukankah dalam penetapan APBD 2015 SKPD telah bersepakat bersama dengan Komisi dan Paripurna DPRD dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah?? Kecuali jika kegiatan yang ada pada SKPD adalah kegiatan yang tidak diketahui ujung pangkalnya ... ujung ujung ada tanpa diketahui SKPD.

APBD 2015 seperti bagian dari "ketakutan" untuk mendistribusikan anggaran yang telah ditetapkan pada Perda APBD. Sebuah ketakutan yang berlebih lebihan yang sebenarnya diakibatkan oleh kesalahan kita kurun satu dasa warsa. Kita dininabobokan oleh fasilitas fasilitas yang sesungguhnya milik publik.

Tidak melaksanakan lebih dari 25% program pada anggaran tahun 2015 bukanlah sikap profesional birokrasi. Penyusunan RAPBD tahun 2015 telah direncanakan secara matang oleh SKPD, TAPD dan pembahasannya di DPRD yang cukup memakan waktu. Selama kelayakan hukum, kelayakan politik dan kelayakan anggaran tersedia, sesungguhnya tidak ada alasan bagi birokrasi untuk menunda kegiatan yang telah diterapkan. *Nek ono madune gelem, nek ono pulute inggrang inggring.* Bahwa semua pilihan- pilihan selalu ada resikonya.

Bukankah sumpah dan jabatan yang kita laksanakan telah kita ucapkan secara lantang karena naiknya jabatan kita. Bukankah kita paham dengan tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing masing. Di sinilah seorang pemimpin harus tegas!!!

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD tahun 2015 telah diatur sebagaimana dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2015, terutama untuk sinkronisasi kebijakan Pemkab dengan Kebijakan Pemerintah. Hal ini untuk mengeliminasi kesenjangan program karena tidak adanya GBHN.

Begitu pula tentang tentang Pertanggungjawaban APBD 2015 sesuai dengan ketentuan PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi ini bukan sekedar memenuhi ketentuan hitam di atas putih, tetapi untuk mengukur capaian kinerja setiap daerah. Apakah APBD yang dikelola dapat optimal atau justru diselewengkan. Karenanya dalam pasal 101 PP ini Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota harus diserahkan kepada BPK paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir.

Dari ketentuan ini seharusnya APBD berpihak kepada **kebutuhan** masyarakat, bukan **keinginan** para elit atau para pejabatnya. Seringkali kita tak mampu membedakan antara KEBUTUHAN dan KEINGINAN.

Stakeholders di Rembang seharusnya bisa belajar banyak dari APBD 2015 yang belanjanya hanya terserap kurang dari $\frac{3}{4}$ nya. Terutama agar serapan APBD 2016 ini dapat lebih baik dari tahun 2015. Jika sekarang ada tanda-tanda kondisi APBD 2016 memiliki kesamaan dengan APBD 2015, mari kita selesaikan secara elegan. Mereka yang "tidak berani" melaksanakan APBD (Perda) silahkan mundur. Rembang hanya diperuntukkan untuk para pemberani yang memahami regulasi dan tupoksi.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Mulyakan

Perkenalkan kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal sebagai aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada kami, antara lain;

1. Agar Kepala Daerah proporsional dan focus dalam melaksanakan tugas dan kinerja, menjalankan wewenang dan tupoksi serta membagi kewenangan untuk mengantisipasi serapan APBD yang minim
2. Agar manargetkan hasil laporan pertanggungjawaban kepada BPK dengan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian) karena selama ini hasil laporan pemkab Rembang selalu WDP (wajar dengan pengecualian)
3. Mengoptimalkan seluruh potensi agar Daya Saing kabupaten Rembang semakin kuat.
4. Memperpendek dan mempercepat layanan publik khususnya dalam pembuatan KTP, KK dan kebutuhan lain masyarakat Rembang.
5. Memberikan perhatian pada seleksi dan penerimaan siswa baru SD/MI/SMP/Mts/SMA/SMK/MA agar tidak ada pungutan-pungutan di luar yang sudah ditentukan.

Berikut kami sampaikan catatan atas Pertanggungjawaban APBD tahun 2015 :

1. Dalam Belanja daerah APBD 2015 data yang serapannya mencapai 73,37% atau 70,79 %.
2. Rendahnya serapan Belanja Daerah tahun 2016 sebisa mungkin jangan terjadi seperti pada APBD 2015. Masih ada waktu untuk terus memperbaikinya, dan kami akan selalu memberikan dukungan maksimal untuk hal ini.
3. Pemkab Rembang segera mengantisipasi kelemahan-kelemahan desa dalam menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban desa. Hal ini dapat dilihat melalui monitoring dan evaluasi tahun 2015 yang dilakukan oleh kecamatan bahwa masih banyak desa yang salah bahkan disclamer dalam melaksanakan pembangunan.
4. Sebagaimana di atas kami mengajak kepada segenap pemangku kebijakan untuk memprioritaskan anggaran perbaikan jalan antar kecamatan. Agar Saudara Bupati memberikan perhatian khusus kepada Dinas PU yang serapan anggarannya masih sangat minim.
5. Pemkab Rembang memberikan prioritas kepada program unggulan khususnya di bidang pariwisata dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.
6. Pemkab agar menyusun urutan daftar serapan SKPD terhadap APBD Rembang baik untuk tahun 2015 ataupun tahun berikutnya dengan memberikan reward and punishment.


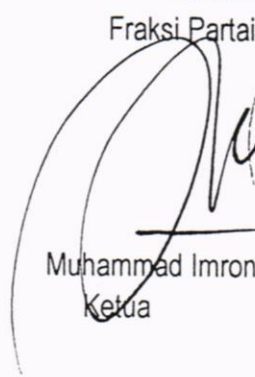
7. Menindaklanjuti hasil temuan BPK yang hasilnya sudah diberikan kepada Pemkab Rembang, terutama hasil audit BPK terhadap aset Pelabuhan Tanjung Bonang

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Mulyakan

Sebagai penutup pemandangan umum ini, kami mengajak kepada seluruh komponen Pemerintah bersama masyarakat untuk selalu memberikan dan mencurahkan segenap tenaga, fikiran untuk bangsa dan negara dalam melawan segala bentuk radikalisme, terorisme dan extrimisme. Seperti dawuh beliau KH Wahab Chasbulloh "Indonesia negriku, Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa dibawah dulimu". NKRI harga MATI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 19 Juli 2016
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa



Muhammad Imron
Ketua

Ilyas
Sekretaris



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG :

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2015

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kab. Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Hadirin sidang paripurna yang kami muljakan,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem tidak lupa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H "Minal Aidzin Wal Faizin" Mohon maaf lahir dan batin.

Menanggapi sambutan Bupati Rembang Pada Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memberikan tanggapan dan catatan sebagai berikut :

1. Dari pencapaian Rencana Pendapatan Daerah dengan realisasi pendapatan sebesar 96,83 % kami memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan berharap dapat ditingkatkan pada tahun anggaran 2015. Adapun Pencapaian yang ideal adalah 100%.
2. Rencana Belanja Daerah dengan Realisasi Belanja Daerah yang nilainya sebesar 73,37 % kami menilai angka pencapaian tersebut masih jauh dari ideal. Pencapaian belanja yang rendah menunjukkan kinerja eksekutif yang kurang maksimal, sehingga berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak maksimal pula. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem meminta komitmen dan rencana yang kongkret kepada Saudara Bupati untuk meningkatkan penyerapan anggaran untuk Belanja Daerah pada tahun 2016 ini. Komitmen dan rencana yang kongkret tersebut dapat berupa menguji kembali kompetensi kepala SKPD sebagai pengguna anggaran agar mampu melaksanakan kegiatan- kegiatan yang sudah direncanakan pada APBD, khususnya kegiatan yang bersifat belanja langsung. Karena Penyerapan Anggaran Belanja yang maksimal diharapkan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.
3. Kelompok pembiayaan atas penerimaan pembiayaan yang nilai pencapaiannya sebesar 101,75 % pada tahun 2015, kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap presentasinya dipertahankan atau bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan yang nilai pencapaiannya sebesar 99,99 % kami menilai nilai tersebut sudah cukup ideal.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat, dengan memberikan catatan yang penting pada poin kedua. Semoga Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini memberikan gambaran yang positif kepada saudara Bupati beserta jajarannya serta rekan-rekan anggota DPRD kabupaten Rembang . Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALI ARCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015**



REMBANG, 19 Juli 2016

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

Disampaikan oleh H.CHASANUDDIN
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 19 Juli 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para wakil ketua DPRD Kabupaten Rembang beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang terhormat, Bupati Rembang beserta jajarannya dilingkungan Pem.kab Rembang;

Yang terhormat, segenap jajaran Muspida Rembang;

Yang terhormat, Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya;

Dan yang senantiasa kita hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat melaksanakan rapat

paripurna pada hari ini dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Sehubungan dengan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Fraksi Gerindra Berdasarkan atas data penyerapan APBD Tahun 2015 akan memberikan beberapa catatan-catatan kritis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah kabupaten Rembang selaku pemegang saham mayoritas di PT. RBSJ harus segera mendorong agar PT.RBSJ segera menyetor Deviden kepada Pemkab Rembang sesuai dengan amanat RUPS yang sudah dilakukan oleh Pemkab Rembang Selaku pemegang saham Mayoritas. Sehingga bisa untuk membiayai program – program Pembangunan yang ada di Rembang.
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera melaksanakan Hasil audit BPK terkait permasalahan yang ada di Pelabuhan Tanjung Bonang sehingga bisa tercipta kepastian Hukum bagi para pihak yang telah berinvestasi dalam segala bentuk untuk Pembangunan Pelabuhan tanjung Bonang tersebut sehingga Pada akhirnya Pemkab Rembang

bisa Mendapatkan Pendapatan dari segala bentuk aktifitas beroperasinya Pelabuhan Tanjung Bonang tersebut.

3. Pemkab Rembang harus memperbaiki perencanaan Pembangunan yang lebih Efektif dan Efisien sehingga Penyerapan APBD bisa mencapai sekurang – kurangnya 90% sehingga menumpuknya SILPA tidak terjadi lagi ditahun – tahun Anggaran berikutnya.
4. Sebagaimana kita pahami, bahwa Kabupaten Rembang saat sekarang sudah menjadi ikon seksi di Jawa Tengah. Hal ini dapat kita rasakan, ternyata konsep pengembangan investasi banyak dilakukan di Jawa Tengah utamanya Kabupaten Rembang. Pendirian pabrik semen di daerah Rembang selatan, pendirian PLTU di daerah Rembang Timur. Pastinya secara operasional kita membutuhkan sarana memadai untuk memediasi keadaan-keadaan genting ini, selama perusahaan-perusahaan besar itu sudah beroperasi. Namun pastinya, satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Apapun yang kita rencanakan harus ada kontribusi dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah dengan maksud utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Rembang.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan pandangan kami sebagaimana, Dari Fraksi Gerindra, intinya meminta pihak eksekutif agar benar-benar serius dalam merencanakan dan melaksanakan APBD ditahun – tahun mendatang. Kemudian pihak eksekutif juga harus senantiasa membiasakan bersikap

konsisten terhadap apa yang sudah direncanakan. Melihat keadaan nilai SILPA sebesar itu, artinya eksekutif kurang serius dalam melaksanakan APBD yang seharusnya bisa dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat Rembang tahun ini menjadi tidak bisa.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahakan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 19 Juli 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


HERI KURNIAWAN, SE.
Ketua




PUJI SANTOSO, SP. MH.
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2015



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang

Hari Selasa, tgl 19 Juli 2016

Juru Bicara : GATOT PAERAN, SH, MSi.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten SEKDA dan Kabag di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat, para Wartawan dan Undangan yang berbahagia

Dalam menyampaikan pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami, Fraksi Karya Sejahtera mengajak para hadirin untuk memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini. Mumpung masih dalam suasana lebaran perkenankanlah kami mengucapkan: "Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1437 H - taqobalallohu minna wa minkum, minal 'aidin wal faizin - mohon maaf lahir batin".

Saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera atas RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang telah disampaikan oleh Sdr. Bupati kemarin sbb,

Dalam Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Th 2015, kami mengamati perjalanan pelaksanaan APBD th 2015 kurang optimal. Setidaknya terlihat dari APBD sejumlah Rp 1.650.799.417.663,- hanya bisa terserap Rp 1.221.257.900.357,- atau hanya 73,37 %.

Dari jumlah tersebut belanja pegawai sebesar 879.485.067.584,- terserap 775.602.699,734,- atau 88.19 %; belanja barang dan jasa sejumlah rp 319,374,118,028,- hanya terserap Rp 195 195,418,791,027,- atau hanya 61,19 %; belanja modal Rp 234,216,282,780,- terserap Rp 51,980,727,019,- atau 22,19 %. Bium (biaya umum seperti honorarium dsb) dari kegiatan-kegiatan terserap habis, tapi kegiatan atau pekerjaan tidak berjalan. Dalam sejarah APBD Kabupaten Rembang, tahun 2015 ini rekor SILPA tertinggi sebesar Rp. 396,607,873,805,-. Ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tidak produktif, aparatur pemerintah mau menerima gaji, tunjangan dan honor lainnya tapi tidak bekerja penuh buktinya belum nampak hasil pekerjaannya.

Rakyat melalui DPRD mengamanatkan anggaran (APBD) agar dibelanjakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bukan hanya untuk “mbayari” pegawai saja. Kedepan kami mengharap Saudara Bupati agar menerapkan “reward and punishment”, penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan hukuman atau sanksi bagi yang lalai menjalankan kewajibannya.

Saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Mengenai kasus Pelabuhan Tanjung Bonang kami masih menyimpan pertanyaan besar. Pansus DPRD Kabupaten Rembang telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, demikian pula Pemerintah Propinsi dan BPK, namun sampai saat ini belum ada langkah dari Saudara Bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat,

Berdasar data BPS tahun 2015, PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Rembang tahun 2014 berjumlah Rp.12.807.000.000.000,- (dua belas trilyun delapan ratus tujuh milyar rupiah), dari angka itu penyumban terbesar adalah sektor pertanian (termasuk perikanan, kelautan dan kehutanan) sebesar 30,80 %, kemudian sektor industri pengolahan (termasuk pengolahan hasil perikanan sebesar 20,80 %.

Sementara dalam kenyataannya Kabupaten Rembang dihadapkan dengan berbagai masalah pada sektor tsb, antara lain:

- a. Tahun 2016 ini Kabupaten Rembang mengalami gagal panen padi sekitar 50 % dampak dari badai "el Nino", sementara petani palawija juga gagal panen karena curah hujan yang tinggi.
- b. Pada akhir tahun 2015 yang lalu terjadi panen raya cabe, tapi petani Rembang tidak menuai hasilnya karena "kejatuhan" harga.

Pertanyaannya, bagaimanakan langkah Pemerintah Kabupaten Rembang mengantisipasi hal-hal tersebut agar di masa depan tidak berulang lagi.

Saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Terkait wacana Saudara Bupati untuk memindahkan Pasar Kota Rembang ke pasar kambing desa Sumberjo, kami meminta agar wacana tersebut dipertimbangkan kembali masak-masak. Saat ini untuk ke Pasar Rembang Kota bisa ditempuh melalui berbagai arah, itu saja lalu lintas masih krodit. Apalagi nanti kalau dipindah ke barat, bekas pasar kambing yang hanya punya 2 akses tak terbayang nanti ruwetnya lalu lintas. Fraksi Karya Sejahtera mengusulkan agar Pasar Kota Rembang tetap pada tempatnya namun dibuat bertingkat sehingga semua pedagang pasar tertampung dan tidak meluber ke jalanan.

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat,

Mengakhiri pemandangan umum ini kami menyampaikan sebuah Piweling Jawa sbb. "Kang kasebat ing gesang ambeg linuhung iku wong kang bangkit amenaki sesama-sama, nora hamung ngugemi wudele dhewe". Artinya, yang disebut dengan hidup luhur itu adalah orang yang bisa membahagiakan sesamanya, tidak hanya untuk kepentingannya sendiri. Demikianlah pemandangan umum Fraksi Karya Sejahtera, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI, SH

Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, S.H.



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2015

Dibacakan Oleh : Sukarma'in

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan
Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD T.A 2015 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati pada Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang T.A 2015 beserta lampiran-lampirannya, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

1. Tentang Bantuan Keuangan Propinsi. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan, hal 52, dijelaskan bahwa bantuan keuangan propinsi untuk Sarana Prasarana hanya dapat direalisasikan sebesar 4,88 % atau Rp. 2.000.000.000,00 dari Rp. 41.000.000.000,00 yang sudah dianggarkan. Mohon untuk dapat dijelaskan, apakah sisa dana yang tidak terserap masih dapat dialokasikan untuk tahun berikutnya.
2. Tentang Belanja Pegawai. Terkait realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 79,42 % dan Insentif Pemungutan Restribusi Daerah yang hanya sebesar 57,41 %, sementara disisi lain pencapaian Pendapatan Pajak Daerah melebihi target yakni sebesar 114,27 % dan Pendapatan Restribusi Daerah sebesar 108,11 %. Menurut kami belanja insentif pemungutan pajak/retribusi secara signifikan mempengaruhi besarnya target pencapaian pendapatan pajak atau retribusi daerah. Mohon dapat dijelaskan secara detil dan terbuka tentang ketidaksinkronan pada rekening pendapatan dan belanja tersebut diatas.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Kami mengharapkan pembahasan Raperda ini dengan memperhatikan sisi kualitatif (bukan semata pencapaian secara kuantitatif), sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif untuk menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan optimal.

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 19 Juli 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name Sukarma'in.

SUKARMA'IN

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (III)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Juli 2016
Waktu : 12.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan
semua undangan lainnya.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah untuk senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat-Nya, karena atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2016 kita kembali bertemu dalam keadaan sehat wal-afiat, untuk mengemban tugas melaksanakan Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Rembang membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, dengan agenda pokok Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan, bahwa ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat Paripurna Ketiga (III) hari ini, adalah sama dengan ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat Paripurna Pertama (I) maupun Rapat Paripurna Kedua (II) membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 yakni dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 34 orang. Dengan demikian ketentuan kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 13.05 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rapat paripurna ketiga ini adalah tindak lanjut atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan dalam rapat paripurna kedua tanggal 19 Juli 2016 kemarin.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam Rapat Paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
3. Penutup.

Kita masuki acara kedua, dan merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu Penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

➤ Interupsi Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.PI. (Fraksi PDI Perjuangan Nasdem)

“ Assalaamu’alaikumWr. Wb. Eee..Yth. Pimpinan Dewan, Sdr. Bupati, ee....sebelum Sdr. Bupati menyampaikan Jawaban Bupati ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari konstituen, diantaranya adalah ;

- 1) APBD Kabupaten Rembang yang sebesar 1,6 T hanya terserap sebesar 1,2 T artinya terserap sebesar sekitar 72% dan hampir 90 % hanya untuk belanja pegawai saja dan

honorarium. Ketika Presiden kita sedang sibuk dengan Tax Amnesty tetapi kita malah membiarkan anggaran untuk menjadi Silpa, ini merupakan bentuk tidak becusnya birokrasi di Kabupaten Rembang.

2) Kalau ada PNS yang tidak mampu menjalankan tugas/ menjalankan anggaran jangan disuruh mundur tetapi pecat saja.

3) Besok Kamis kita sudah masuk dalam pembahasan komisi – komisi dan untuk SKPD – SKPD saya minta untuk serius dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan, karena diterima atau tidaknya Raperda Pertanggungjawaban ini tinggal besok.

Sekian Terima Kasih

➤ Jawaban Pimpinan Sidang (H. Majid Kamil MZ)

“ Sebaiknya hal kaya gini dituangkan dalam Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi kemarin dan juga pertanyaan Saudara tadi sudah ada dalam Pemandangan Umum Fraksi kemarin.”

➤ Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.PI.

“ Saya hanya menggunakan hak saya Pimpinan sebagai anggota DPR untuk menyatakan pendapat mumpung saya masih jadi anggota DPRD. Terima Kasih “

➤ Tanggapan dari Bupati Rembang (H. Abdul Hafidz)

“ Terima kasih buat masukannya. Perlu saya garis bawahi bahwa kami sudah melakukan upaya – upaya agar tidak terserapnya anggaran di tahun 2015 tidak terulang lagi di tahun 2016. Kami setiap hari senin sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD dan semua camat. Kami juga melakukan koordinasi dengan Tim TP4D, Kejaksaan, dan Kepolisian. Perlu kami sampaikan

bahwa kecilnya penyerapan anggaran tidak terjadi di Rembang saja tetapi skalanya nasional, jadi kami minta semua untuk memahami.”

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

===== JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI =====

➤ *(Penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi telah kita ikuti dan kita dengar bersama, penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya setelah usai rapat paripurna ini, pada hari ini juga akan dilaksanakan penjelasan lanjutan atas Raperda dalam rapat Badan Anggaran dan TAPD, diteruskan dengan Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi untuk melakukan strategi dan distribusi pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.


Akhirnya, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna hari ini.

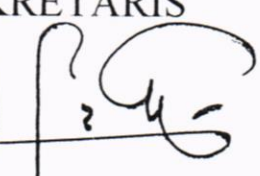
Dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

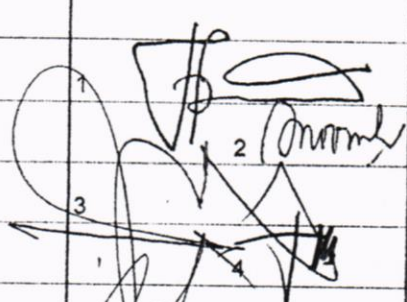
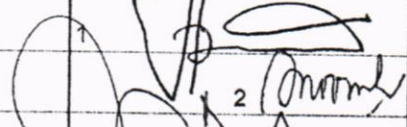
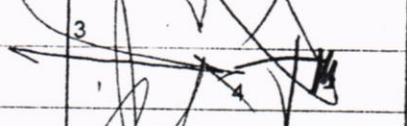
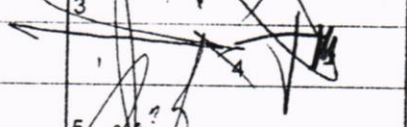
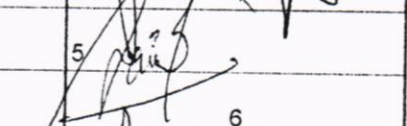
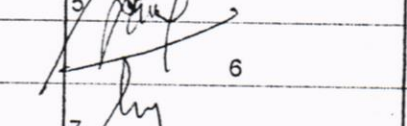
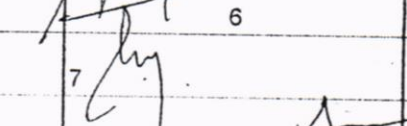
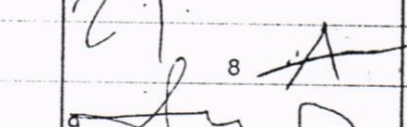
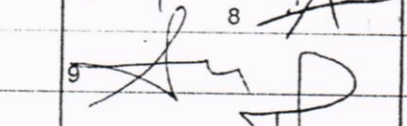
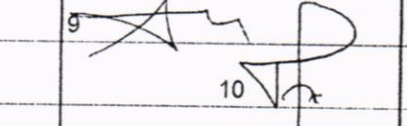
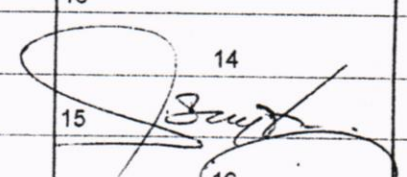
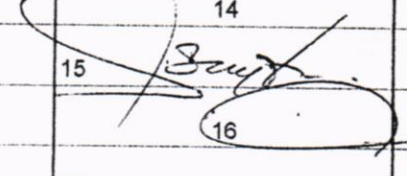
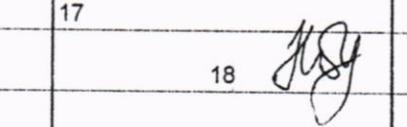
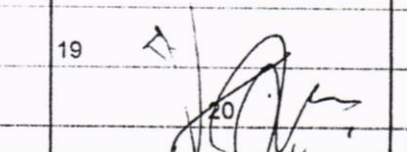
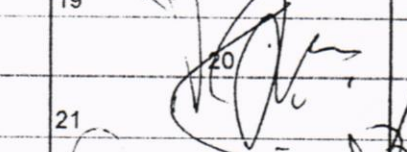
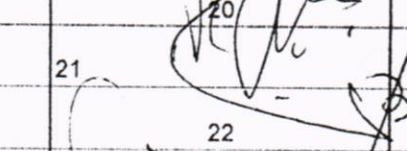
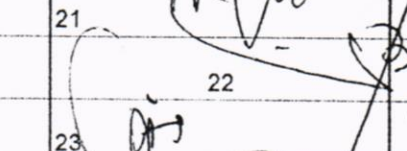
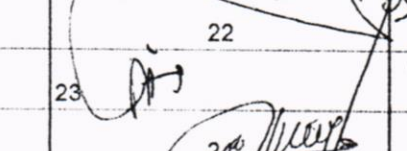
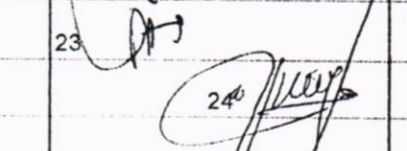
LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

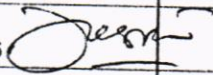
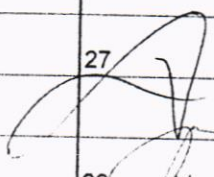
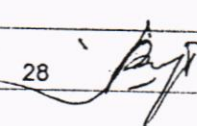
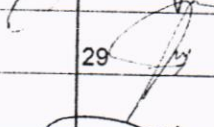
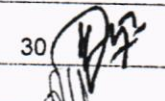
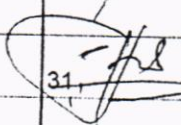
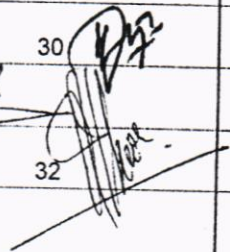
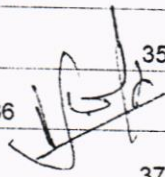
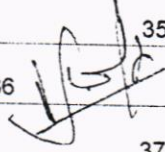

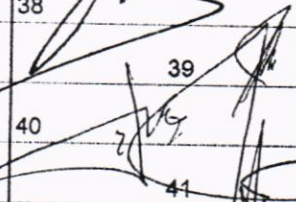
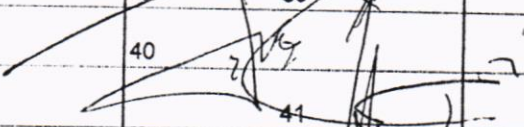

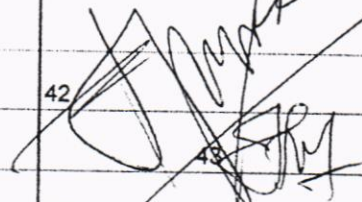
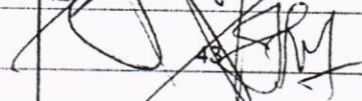

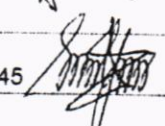
LAMPIRAN II : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015

HARI/TANGGAL : RABU, 20 JULI 2016

PUKUL : 12.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11 ✓	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16 	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18 	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21 	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22 	
23	WASIMAN	Anggota	23 	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24 	

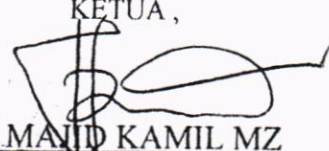
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26 	
27	WIDODO	Anggota	27 	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28 	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30 	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32 	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 ✓	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35 	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36 	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38 	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39 	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40 	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41 	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42 	
43	NUR JANNAH	Anggota	43 	
44	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	44 	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	45 	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,


H. MAUID KAMIL MZ

DAFTAR HADIR FORKOMFINDA
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015

HARI/TANGGAL : RABU , 20 JULI 2016
PUKUL : 12.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	Dandim 0720 Rembang	5.
6	Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir . HARI SUSANTO. M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	8. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015

HARI/TANGGAL : RABU , 20 JULI 2016

PUKUL : 12.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. W. YONG	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	Isyanto	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

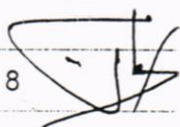

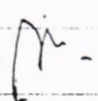
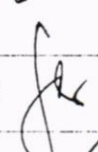
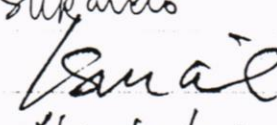
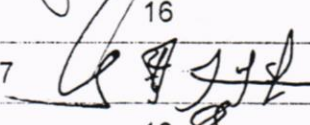

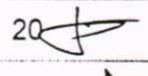









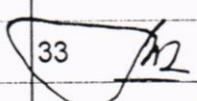
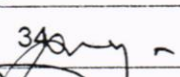

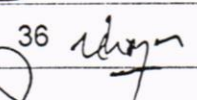
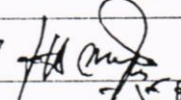
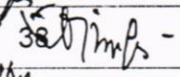
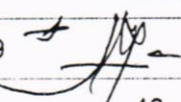
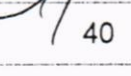

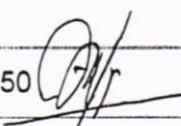


 Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

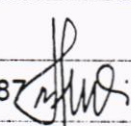
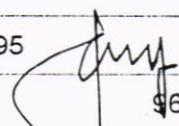



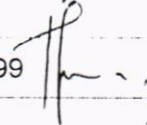
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015**

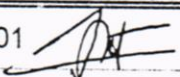


HARI/TANGGAL : RABU , 20 JULI 2016

PUKUL : 12.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alex sanna	Kabag	8 
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johan W	Ka Bag	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	AMP Mawadun	Kesrs	13 
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Suparso		15 
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD	Heri d. h. h.		17 
18	INSPEKTORAT	B. Suwignyo		18 
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	HIGATIWI	sekret	20 
21	B K D			21
22	BKP & P4K			22
23	B P B D	ANJIK	Sek	23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Triyoho/awilo	Sekt	24 
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utom	Sek	25 
26	DINAS PENDIDIKAN	Nugroho TH.	Rekam.	26 
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Cipto - 60	Ka Bag Keraga	28 
29	DINLUTKAN			29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	KHUBROUW	SEWA	31 
32	DINSOSNAKERTRANS	PRAPTO . R	Plt. SEKIDAN	32 
33	DINBUDPARPORA	SURYANTAY	SEK	33 
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryasa	SEK.	34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rusdiyanto	SEK	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	KESTAB	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Suriana	TU	37 
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyarti	KE KAPT	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y. Bico. S.	keab TU	39 
40	SATPOL PP			40 
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	Herrawan	ke keu	42 
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	MUSTHOFA		50 
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Honorary	K. Hanes	54 
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)	MUOTO	KEPALA	63 
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	Masuch	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95	DINHUBKOMINFO	Suyono	Ka Dinas	95 
96		Agus W	TA FICS	96 
97	dinhub kominfo	gusti enna		97 
98	M. INDRA K.	PURUS. Mkp.		98 
99	Heri Sulistyoko			99 
100				100

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
101	SRI WATIWI	DRP/PLAH		101 
102	Agus	KODIM		102 
103	NY. MASRI	PKK. KAB. RBC.		103 
104				104
105				105



SEKRETARIS DI R.D. KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF

19620804 198803 1 011



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN REMBANG**



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Sdr Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Muspida Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pidato jawaban kami atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan dan tak kurang suatu apa.

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.455.130.917.329,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.408.950.534.485,80 atau 96,83%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.650.799.417.663,00 realisasinya adalah sebesar Rp.1.211.257.900.367,74 atau 73,37% sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.206.340.500.334,00 realisasinya sebesar Rp.209.585.690.530,55 atau 101,57% dan Pengeluaran Pembiayaan yang

direncanakan sebesar Rp.10.672.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 10.617.000.000,00 atau 99,99%

Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan-catatan yang berkembang dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang, berikut saya sampaikan jawaban dan/atau klarifikasinya :

A. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. TENTANG PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 TERJADI SILPA YANG SANGAT TINGGI YAKNI 26,63% (Sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Gerakan Indonesia Raya, PKS dan PKB).

Jawaban :

Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan Penyerapan Anggaran sehingga SiLPA akan semakin kecil. Langkah-langkah tersebut adalah perbaikan beberapa regulasi, pendampingan TP4D dan Polres serta Rapat tiap hari senin dengan seluruh SKPD.

2. TENTANG OPTIMALISASI KINERJA BUMD TERUTAMA PT RBSJ (Sekaligus Menjawab Pertanyaan Fraksi Gerakan Indonesia Raya).

Jawaban :

- Bahwa berdasarkan hasil audit KAP tutup buku tahun 2014 dan 2015 PT RBSJ memperoleh laba berjalan, namun mengingat sampai saat ini masih mempunyai akumulasi kerugian (sejak tahun 2010 – 2013 rugi) maka PT RBSJ belum bisa setor deviden (UU No. 40 Th. 2007 psl 71 , Akta Perubahan no 226 tgl 27 Maret 2008 psl 18);
- Bahwa kewenangan mengganti jajaran Direksi maupun komisaris terletak di RUPS dalam hal ini adalah RUPS Luar Biasa. Jika jajaran direksi/komisaris perlu dilakukan perombakan berdasarkan peraturan perundangan yang ada, maka akan kami lakukan.

3. TENTANG PELAKSANAAN PERBAIKAN JEMBATAN PALAN DI DESA PAMOTAN.

Jawaban :

Terima kasih atas semua saran dan masukannya, kami akan usahakan segera untuk berkoordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan kegiatan perbaikan jembatan Palan Desa Pamotan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan Propinsi bukan kegiatan Kabupaten Rembang.

4. TENTANG PENGALIHAN STATUS RUAS JALAN PAMOTAN-CLANGAPAN MENJADI STATUS JALAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI.

Jawaban :

Untuk menanggapi usulan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan maka akan kami usahakan untuk memenuhi usulan tersebut dengan melakukan kajian dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memproses pengalihan status jalan ruas Pamotan – Rembang yang saat

ini merupakan wewenang Kabupaten Rembang menjadi status jalan Propinsi.

5. TENTANG SERING MUNCULNYA ADUAN DARI MASYARAKAT DAN LSM SEKITAR PANTAI BERKAITAN DENGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN AIR LAUT AKIBAT DARI LIMBAH PENGOLAHAN IKAN.

Jawaban :

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang telah membuat telaah staf untuk membentuk pengawasan terpadu bersama dinas-dinas lain, LSM dan pihak Kepolisian, serta BLH Kabupaten Rembang sudah melakukan pemantauan berkala dengan pengujian Laboratorium di perusahaan-perusahaan ikan dan memberikan sanksi administratif teguran tertulis. Disamping itu BLH juga melakukan pengawasan semesteran berupa pengawasan teknis dan pengawasan perizinan/administrasi, tetapi mengingat perusahaan masih banyak yang belum mempunyai IPAL sehingga belum bisa memenuhi baku mutu air limbah sesuai parameter yang telah ditetapkan peraturan. Kedepan akan kami dorong perusahaan untuk membangun IPAL terpadu yang memenuhi standar teknis.

6. TENTANG PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KTP-el DAN KK.

Jawaban :

Untuk memperpendek dan mempercepat layanan public khususnya dalam pembuatan KTP-el dan KK :

- a. Pencetakan KTP-el yang semula dilakukan di pemerintah pusat sekarang dilakukan di kabupaten/kota yang memakan waktu 1 sampai 2 hari selesai dibandingkan sebelumnya yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
- b. Perekaman KTP-el dilakukan di kecamatan, sedang pencetakan KTP-el di Dindikcapil dimana pemohon tidak harus hadir sendiri / bisa diwakilkan.
- c. Permohonan KTP-el makin lama makin menurun jumlahnya karena sudah berlaku seumur hidup kecuali ada perubahan.
- d. Pembuatan KK cukup ditangani di kecamatan.

B. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

1. TENTANG REALISASI BELANJA PEGAWAI TERKAIT TPP, HONOR PNS DAN NON PNS SERTA BELANJA PEGAWAI BLUD.

Jawaban :

- a. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Pemberian honor kepada PNS dan Non-PNS diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikarenakan PNS

tersebut memiliki kompetensi terhadap penyelesaian kegiatan dimaksud, contoh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan Honor atas dasar pelaksanaan penyusunan dokumen kontrak atas pengadaan barang/jasa tersebut.

- c. Belanja pegawai BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 32.888.255.269,- tidak terkait TPP PNS, honor PNS, dan Non PNS karena nilai belanja Pegawai tersebut hanya merupakan belanja Pegawai RSUD Non PNS dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya Pelayanan, sebesar Rp 29.682.574.509, terdiri dari Gaji pegawai BLUD, jaminan kesehatan pegawai BLUD, tunjangan hari tua pegawai BLUD; honorarium kelangkaan profesi, honor dokter residen, dokter tamu, dokter jaga; perawat supervisor, perawat dan bidan magang, tenaga harian lepas cleaning service, Kamtib, sopir; biaya jasa pelayanan, rohaniawan, memandikan jenazah, Tunjangan hari raya.
 - Biaya Umum dan administrasi, sebesar Rp. 3,205,680,760.00, untuk membayar Honor tim pengelola JKN, honor pendidik UII, honor PKRS, honor SPI, Dewan Pengawas, Honor Panitia pengadaan barang/jasa, PPKom, PPTK, PPHP dll.

2. TENTANG PEMBELIAN BERAS DARI PETANI AGAR DITINGKATKAN DAN HARGA HPP NYA DINAIKKAN.

Jawaban :

Untuk meningkatkan pembelian beras dari petani telah dibentuk Tim Serapan Gabah (Tim SERGAP) yang beranggotakan: KODIM 0720 Rembang, BULOG, Dinas Pertanian dan Kehutanan, BKP& P4K.

Target Pengadaan Beras tahun 2016 Bulog Rembang sebesar : 12.500ton, s/d 30 juni 2016 telah terealisasi 14,535 ton (121 %).

Harga gabah petani selama musim Panen 2016 masih diatas Harga HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp 3.700,-/ kg dengan kadar air 25 %

3. TENTANG PEMBANGUNAN DAN NORMALISASI EMBUNG, IRIGASI DAN JUGA SUMUR UNTUK PERTANIAN.

Jawaban :

Terima kasih atas masukan dan dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kab. Rembang melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan telah menganggarkan pembangunan Embung Pertanian sebanyak 4 unit dan Jaringan Irigasi sebanyak 20 lokasi (sepanjang 2.000 m).

4. TENTANG PENATAAN PASAR KOTA REMBANG.

Jawaban :

Terima kasih atas masukannya, kami terus berupaya melakukan penataan dan pengaturan pasar kota Rembang bersama dengan instansi terkait. Penataan tersebut juga kami laksanakan terhadap pasar-pasar yang lain missal pasar Sarang, Pandangan, Lasem dan Pamotan melalui APBD 2016.

C. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. TENTANG PERBEDAAN ANGKA TENTANG PENYERAPAN BELANJA DAERAH APBD 2015 MENCAPAI 73,37% ATAU 70,79%.

Jawaban :

Bahwa serapan Belanja Daerah Pelaksanaan APBD TA. 2015 adalah 73,37% atau sebesar Rp. 1.211.257.900.367,74 atas pagu anggaran sebesar Rp. 1.650.799.417.663,00.

Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Daerah selain disajikan dalam format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, dimana Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung, Laporan Keuangan Daerah juga disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk diaudit oleh BPK dengan struktur Belanja Daerah yaitu Belanja dan Transfer dengan rincian:

- Belanja, sebesar Rp. 1.049.597.949.567,74 atas pagu anggaran sebesar Rp. 1.482.739.304.192,00 (70,79%)
- Transfer, sebesar Rp. 161.659.950.800,00 atas pagu anggaran Rp. 168.060.133.471,00 (96,19%) – merupakan belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

2. TENTANG ANTISIPASI PEMKAB REMBANG MENGENAI KELEMAHAN-KELEMAHAN DESA DALAM MENYUSUN DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN YANG MENJADI KEWAJIBAN DESA.

Jawaban :

Terima kasih atas masukannya, upaya-upaya mengantisipasi kelemahan Desa sudah kami lakukan dengan mengadakan Bimbingan-bimbingan teknis seperti administrasi desa, pengelolaan keuangan Desa, pertanggungjawaban keuangan desa, pelaporan keuangan desa dan pelatihan-pelatihan bagi Aparatur Kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa Se- Kabupaten Rembang dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dana transfer yang ke Desa-Desa sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, serta Bagian Tata Pemerintahan membuka konsultasi bagi Desa maupun Kecamatan setiap hari.

3. TENTANG PRIORITAS ANGGARAN PERBAIKAN JALAN ANTAR KECAMATAN.

Jawaban :

Terima Kasih atas sarannya dan sudah kami laksanakan.

4. TENTANG PENYEIDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI UNTUK Mendukung Prioritas Program Unggulan Khususnya Di Bidang Pariwisata.

Jawaban :

Terima kasih atas sarannya dan akan kami tindaklanjuti.

5. TENTANG DAFTAR URUTAN SERAPAN SKPD TERHADAP APBD REMBANG DENGAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT.

Jawaban :

Terima kasih atas saran yang diberikan, untuk ke depannya akan kami tindaklanjuti.

6. TENTANG TINDAKLANJUT HASIL AUDIT BPK TERHADAP ASET PELABUHAN TANJUNG BONANG (Sekaligus Menjawab Pertanyaan Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Karya Sejahtera).

Jawaban :

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Audit BPKP dalam rangka Operasionalisasi Pelabuhan Tanjung Bonang, salah satu langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah mengajukan permohonan Rekomendasi teknis kepada Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan RI di Jakarta sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Rembang Nomor : 550/0476/2016 tanggal 28 Maret 2016. Berdasarkan surat Permohonan tersebut Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan RI mengundang Rapat Bupati Rembang di Direktorat Kepelabuhan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016, dimana salah satu hasil Rapat merekomendasikan kepada Bupati Rembang agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menyerahkan lahan kepada Penyelenggara Pelabuhan/ Ka. UPP Kelas III Rembang.

Berdasarkan Rekomendasi tersebut telah dilakukan Rapat pada tanggal 1 Juli 2016 di Ruang Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang, yang membahas penyerahan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Penyelenggara Pelabuhan/ Ka. UPP Kelas III Rembang. Untuk dapat melaksanakan penyerahan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Rembang perlu diawali dengan Permohonan Ijin kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI melalui Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Rembang. Permohonan Ijin tersebut perlu dilampiri data pendukung sebagai berikut :

- a. Naskah Perjanjian Hibah antara Bupati Rembang dengan Kepala UPP Kelas III Rembang.
- b. Rencana kebutuhan lahan untuk Operasional Pelabuhan dari Kepala UPP Kelas III Rembang sesuai dengan RIP, DLKr dan DLKp.
- c. Asal usul Kepemilikan Tanah HPL Pemerintah Kabupaten Rembang dari PT. RBSJ

Dalam hal ini saya telah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk menyusun Naskah Perjanjian Hibah, memerintahkan Dirut PT. RBSJ untuk menyiapkan data pendukung Asal usul kepemilikan Tanah HPL Pemerintah Kabupaten Rembang, dan telah mengirim surat Kepada Kepala UPP Kelas III Rembang untuk menyiapkan Rencana kebutuhan lahan untuk Operasional Kebutuhan Pelabuhan sebagai dasar Permohonan Ijin kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI di Jakarta.

Apabila Ijin dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI telah terbit, maka penyerahan Tanah HPL Pemerintah Kabupaten Rembang Kepada Kepala UPP Kelas III Rembang dapat dilaksanakan. Penyerahan tersebut didahului dengan kegiatan Appraisal independen, hal ini dalam rangka memudahkan penghapusan Barang Milik Daerah.

Dalam hal Penyerahan Tanah HPL tersebut telah dilaksanakan tahapan selanjutnya adalah penunjukan BUP oleh Bupati Rembang dalam rangka Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan. BUP yang telah ditunjuk Bupati Rembang harus melakukan kerja sama dengan

Pemerintah Kabupaten Rembang dan selanjutnya mengajukan Permohonan Konsesi kepada Penyelenggara Pelabuhan/ Kepala UPP Kelas III Rembang. Apabila BUP telah mendapatkan Konsesi, maka Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menikmati Pendapatan dari Hasil kerja sama dengan BUP yang mendapat Konsesi. Hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Rembang dari Hasil kerjasama dengan BUP sebagian diserahkan kepada para Investor yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Reklamasi pada Tanah HPL Pemerintah Kabupaten Rembang.

Agar dapat melaksanakan Hasil Audit BPK, maka tahapan – tahapan yang telah saya jelaskan sebagaimana tersebut di atas harus dapat diselesaikan terlebih dahulu.

D. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN – NASIONAL DEMOKRAT

1. TENTANG PENCAPAIAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

Jawaban :

Terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Nasional Demokrat atas pencapaian realisasi pendapatan dan pembiayaan, atas kurang idealnya pencapaian realisasi belanja akan kami laksanakan percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, sebagaimana jawaban kami untuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Gerindra dan PKB di depan.

E. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. TENTANG KONSEP PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN REMBANG HARUS MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM MENAIKKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA PEMKAB REMBANG HARUS SERIUS DALAM MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN APBD DITAHUN-TAHUN MENDATANG.

Jawaban :

Kami mengapresiasi atas apa yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Kami akan mengusahakan agar apa yang direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal sehingga angka SILPA dapat diminimalisir. Disamping itu dalam hal peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, salah satu upaya yang kami laksanakan adalah menyusun perencanaan teknis pada APBD Perubahan Tahun Anggaran sebelumnya.

F. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA

1. TENTANG MASALAH GAGAL PANEN DI SEKTOR PERTANIAN.

Jawaban :

Untuk membantu petani yg mengalami puso pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan ,di tahun anggaran 2016 telah membantu benih kepada petani sebesar :

Benih Padi : 125 ton

Jagung : 90 ton

Kedelai : 121 ton

Bantuan Saprodi cabe Merah seluas 40 ha

Bantuan Saprodi Cabe Rawit 40 ha

Disamping itu Dintanhut juga memberikan informasi dan pembinaan teknis dalam rangkaantisipasi menyikapi keadaan musim yang ekstrim dan sulit diprediksi.

2. TENTANG WACANA MEMINDAHKAN PASAR KOTA REMBANG.

Jawaban :

Sebelum merealisasikan wacana tersebut perlu adanya beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain:

1. Menyusun Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Kota Rembang

Studi Kelayakan pasar Kota Rembang harus dilakukan untuk menjadi dasar acuan bagi proses awal pembangunan bahkan pemindahan lokasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pasar tersebut harus dipindah atautkah hanya perlu penataan bangunan sehingga dapat menampung seluruh pedagang yang ada dengan infrastruktur baru yang lebih baik dan lengkap. Studi kelayakan juga harus dilakukan berdasarkan kerjasama antara Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang dengan Pergurutan Tinggi atau Non Government Organisation yang bersifat independen yang melakukan studi kepada seluruh komponen yang terkait dengan pasar Kota Rembang baik pedagang, pengunjung, masyarakat sekitar serta produsen yang berkaitan dengan proses jual beli di Pasar Kota Rembang.

2. Menyusun Studi Kelayakan Lokasi Baru (Pasar Kambing Desa Sumberjo)

Studi Kelayakan Pasar Kambing Desa Sumberjo juga perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah lokasi baru yang akan digunakan untuk pasar tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Studi kelayakan juga harus dilakukan berdasarkan kerjasama antara Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang dengan Pergurutan Tinggi atau Non Government Organisation yang bersifat independen yang melakukan studi kepada seluruh komponen yang terkait dengan pasar Kota Rembang baik pedagang, pengunjung, masyarakat sekitar serta produsen yang berkaitan dengan proses jual beli di Pasar Kota Rembang serta dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan system kepemilikan lahan, rencana tata ruang dan wilayah daerah serta rencana pembangunan daerah Kabupaten Rembang baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

G. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HARAPAN

1. TENTANG DANA BANTUAN PROVINSI YANG HANYA TEREALISASI SEBESAR Rp.2.000.000.000,00.

Jawaban :

Bantuan Keuangan Propinsi untuk sarana prasarana dana akan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang oleh Pemerintah Propinsi bila dokumen pengadaan barang/jasa telah lengkap dan telah mendapatkan pengesahan.

Berkenaan Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2015 sisanya tidak dapat dianggarkan kembali karena dananya belum ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.

2. TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBESAR 79,42% DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH SEBESAR 57,42%.

Jawaban :

Memperhatikan pernyataan Fraksi Harapan terkait dengan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan bahwa pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan atas Capaian Rencana Kinerja pada SKPD Pemungut Pajak dan Retribusi, bukan pada pencapaian/realisasi target APBD. Hal ini sesuai dengan keteantuan Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

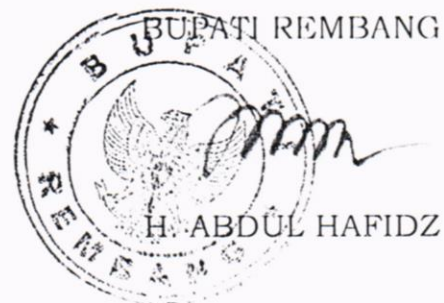
Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat Kami jelaskan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis saya mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang,



H. ABDUL HAFIDZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (IV)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

Hari : KAMIS
Tanggal : 28 Juli 2016
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
 3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
 4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015,
 5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;

6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Rembang

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat
se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua
undangan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu
persatu.

Segala puja dan puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kuasa-Nya, pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2016 kita bisa hadir di Ruang Rapat DPRD untuk mengikuti Rapat Paripurna Keempat (IV) DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna Keempat (IV) ini, adalah sama dengan ketentuan kuorum pada Rapat-rapat Paripurna sebelumnya, baik Rapat Paripurna Pertama (I), Kedua (II), Ketiga (III) dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, yakni dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang.

Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11. 25 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Juli 2016, dilalui dengan berbagai tahapan, baik yang sifatnya internal yakni dibahas oleh DPRD sendiri, maupun yang bersifat eksternal yakni dibahas oleh DPRD bersama eksekutif. Dan rapat paripurna ini merupakan rapat terakhir dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Terdapat beberapa agenda yang harus kita lalui dalam pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015,
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;

6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;

7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Waktu dan tempat dipersilahkan.

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Saya minta Sdr. Puji Santoso, S.P, M.H. bisa mewakili anggota Badan Anggaran untuk membacakan Laporan Badan Anggaran, karena Pak Mualif Sekretaris tetapi bukan anggota Badan Anggaran.”

=== **PEMBACAAN LAPORAN BADAN ANGGARAN** ===

➤ (*Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Kepada Saudara-saudara yang ditunjuk menyampaikan pendapat fraksi saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Sdri. Imro'atus Sholichah,S.E, M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Widodo
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P, M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Catur Winanto, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdri. Nur Jannah

Secara berurutan dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerindra	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari hasil Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi-Fraksi, sudah dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2015 dapat diterima dan disetujui menjadi Peraturan Daerah, namun dalam keabsahannya perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD terlebih dahulu.

Untuk itu, saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dan Rekomendasi yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara kelima yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dimohon kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

===== **PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD** =====

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Atas dasar Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 yang telah disetujui bersama, nantinya oleh Bupati akan disusun Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 beserta Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.

Selanjutnya, marilah kita masuki acara berikutnya, acara terakhir yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

➤ H. Abdul Hafidz (Bupati Rembang)

“ Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD semua, karena kita sama-sama mempunyai pandangan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Pertama-tama ada yang perlu saya tanggapi yaitu berkaitan soal panen petani yang tidak panen itu dikarenakan oleh alam yaitu anomali cuaca, yang biasanya penghujan malah seperti kemarau, biasanya kemarau malah seperti penghujan tetapi kita sebagai Pemerintah Kabupaten tetap memperhatikan kaum petani. Terkait dengan adanya masyarakat yang tidak mendapatkan jatah kartu BPJS dari pemerintah pusat ini sudah diberitakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rembang bahwa mendapat jatah Kartu BPJS dari Pemerintah Pusat sebanyak 384.000, dan jika masih ada masyarakat yang belum mendapat kartu BPJS / belum terdaftar saya minta tolong lewat anggota DPRD untuk disampaikan kepada masyarakat miskin yang belum mendapat kartu BPJS supaya untuk

segera melapor kepada Kepala Desa dan Kepala Desa akan mendaftarkan ke Dinas Sosial, Dinas Kesehatan supaya nanti dapat terdaftar ke BPJS sebagai anggota, ini sudah saya sampaikan pada camat- camat se Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati terkait yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anggaran 2015, jujur saja saya memahami apa yang disampaikan oleh teman – teman DPRD tetapi Insyaallah Tahun 2016 tidak terulang kembali. Ini sudah bulan 7 Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai berjalan dengan baik dan saya minta doanya kepada semua anggota DPRD agar tidak sampai terjadi kembali kejadian seperti tahun 2015. Memang benar pekerjaan yang berupa fisik/ konstruksi ini tidak semua harus mendapat persetujuan/ legalitas dari DPU. Yang perlu mendapat persetujuan dari DPU yaitu berupa fisik berupa gedung lainnya tidak itu saja menurut Peraturan Menteri. Ini saya sampaikan agar bisa sepaham dan tidak saling menyalahkan. Semua hadirin yang saya hormati berkaitan dengan rekomendasi yang berjumlah 26 tadi saya dan Bapak Wakil Bupati dan teman –teman SKPD pasti akan kita tindaklanjuti. Dan saya minta kita bersama- sama bisa Guyub Rukun bersama DPRD. Sekian Akhirul kalam Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

====**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI**====

➤ *(Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2015 terlampir)*

Terima kasih saudara Bupati atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Akhirnya, terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD baik yang masuk dalam Komisi maupun Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan lancar sesuai waktu yang dijadwalkan.

Kepada saudara-saudara yang telah mengikuti rapat , kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat paripurna.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Alhamdulillah* *robabil ‘alamin* “ tepat pukul 13.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.



SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor 10... Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN V : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor 900/...../ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 Menjadi Peraturan Daerah.

**RAPAT PARIPURNA IV DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
RAPERDA APBD TH. 2015
HARI/TANGGAL : KAMIS ,28 JULI 2016
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**



TENTANG

**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2015



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Surat Bupati Rembang Nomor 900/1393/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Pengiriman Raperda;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 12 Juli 2016 yang mengagendakan Jadwal Rapat-rapat DPRD dalam membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2016 Jam 12.00 WIB dengan agenda penjelasan lanjutan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi - komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2016 Jam 14.00 WIB membahas Strategi dan distribusi Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
- c. Rapat-rapat Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
Hari : Kamis - Senin
Tanggal : 21 sampai dengan 25 Juli 2016
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang

- Acara : Pendalaman Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015
- d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi
DPRD Kabupaten Rembang pada :
- Hari : Selasa
Tanggal : 26 Juli 2016
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi atas
pendalaman Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2015
- e. Rapat Badan Anggaran Internal pada :
- Hari : Selasa
Tanggal : 26 Juli 2016
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Rembang
Acara : Membahas Laporan Komisi terhadap
Pendalaman Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013
- f. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :
- Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2016
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Rembang
Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil
pembahasan Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. HASIL PEMBAHASAN

RINGKASAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 2015

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
1	2	3	4	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	1.455.130.917.329,00	1.408.950.534.485,80	1.408.950.534.485,80	(46.180.382.843,20)	96,83
1.1	Pendapatan Asli Daerah	184.956.739.329,00	193.122.759.856,80	193.122.759.856,80	8.166.020.527,80	104,42
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.023.000.000,00	42.306.265.606,00	42.306.265.606,00	5.283.265.606,00	114,27
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	29.756.100.500,00	32.227.998.903,00	32.227.998.903,00	2.471.898.403,00	108,31
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.429.911.000,00	4.447.117.385,00	4.447.117.385,00	17.206.385,00	100,35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.747.727.829,00	114.141.377.962,80	114.141.377.962,80	393.650.133,80	100,35
1.2	Dana Perimbangan	881.908.674.000,00	852.722.349.235,00	852.722.349.235,00	(29.186.324.765,00)	96,69
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.792.967.000,00	31.211.494.235,00	31.211.494.235,00	(4.581.472.765,00)	87,20
1.2.2	Dana Alokasi Umum	723.091.447.000,00	723.091.447.000,00	723.091.447.000,00	-	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	123.024.260.000,00	98.419.408.000,00	98.419.408.000,00	(24.604.852.000,00)	80,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	388.265.504.000,00	363.105.425.394,00	363.105.425.394,00	(25.160.078.606,00)	93,52
1.3.1	Hibah	1.492.290.000,00	138.351.272,00	138.351.272,00	(1.353.938.728,00)	9,27
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	67.809.000.000,00	84.351.397.342,00	84.351.397.342,00	16.542.397.342,00	124,40
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	268.637.095.000,00	268.241.945.000,00	268.241.945.000,00	(395.150.000,00)	99,85
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.327.119.000,00	10.373.731.780,00	10.373.731.780,00	(39.953.387.220,00)	20,61
2	BELANJA DAERAH	1.650.799.417.663,00	1.211.257.900.367,74	1.211.257.900.367,74	(439.541.517.295,26)	73,37
2.1	Belanja Tidak Langsung	977.776.151.430,00	849.862.882.664,00	849.862.882.664,00	(127.913.268.766,00)	86,92
2.1.1	Belanja Pegawai	760.052.202.159,00	661.607.200.077,00	661.607.200.077,00	(98.445.002.082,00)	87,05
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000,00	7.985.987,00	7.985.987,00	(29.014.013,00)	21,58
2.1.4	Belanja Hibah	43.331.165.800,00	23.873.745.800,00	23.873.745.800,00	(19.457.420.000,00)	55,10
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.295.670.000,00	2.714.000.000,00	2.714.000.000,00	(2.581.670.000,00)	51,25
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	6.157.224.400,00	6.157.224.400,00	6.157.224.400,00	-	100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	161.902.089.071,00	155.502.726.400,00	155.502.726.400,00	(6.400.162.671,00)	96,05
2.1.8	Belanja Tidak Teruga	1.000.000.000,00	-	-	(1.000.000.000,00)	-
2.2	Belanja Langsung	673.023.266.233,00	361.395.017.703,74	361.395.017.703,74	(311.628.248.529,26)	53,70
2.2.1	Belanja Pegawai	119.432.865.425,00	113.995.499.657,00	113.995.499.657,00	(5.437.365.768,00)	95,45
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.374.118.028,00	195.418.791.027,74	195.418.791.027,74	(123.955.327.000,26)	61,19
2.2.3	Belanja Modal	234.216.282.780,00	51.980.727.019,00	51.980.727.019,00	(182.235.555.761,00)	22,19
	Jumlah Belanja	1.650.799.417.663,00	1.211.257.900.367,74	1.211.257.900.367,74	(439.541.517.295,26)	73,37
	surplus (devisit)	(195.668.500.334,00)	197.692.634.118,06	197.692.634.118,06	393.361.134.452,06	(101,03)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	206.340.500.334,00	209.585.690.530,55	209.585.690.530,55	3.245.190.196,55	101,57
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	206.340.500.334,00	209.585.690.530,55	209.585.690.530,55	3.245.190.196,55	101,57
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	206.340.500.334,00	209.585.690.530,55	209.585.690.530,55	3.245.190.196,55	101,57
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.672.000.000,00	10.670.450.843,00	10.670.450.843,00	(1.549.157,00)	99,99
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.617.000.000,00	10.617.000.000,00	10.617.000.000,00	-	100,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000,00	53.450.843,00	53.450.843,00	(1.549.157,00)	97,18
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.672.000.000,00	10.670.450.843,00	10.670.450.843,00	(1.549.157,00)	99,99
	Pembiayaan Netto	195.668.500.334,00	198.915.239.687,55	198.915.239.687,55	3.246.739.353,55	101,06
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		396.607.873.805,61	396.607.873.805,61	396.607.873.805,61	

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		6=4+5		
1	2	3	4	5	6=4+5
1	DINAS PENDIDIKAN		546.568.196.159,00	74.661.263.000,00	621.229.459.159,00
2	DINAS KESEHATAN	33.761.688.000,00	37.835.693.000,00	59.153.932.661,00	96.989.625.661,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	67.500.000.000,00	23.462.745.000,00	81.444.703.562,00	104.907.448.562,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.655.000.000,00	13.582.876.000,00	199.285.949.120,00	212.868.825.120,00
5	BAPPEDA		3.232.849.000,00	8.131.500.000,00	11.364.349.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.593.864.000,00	5.151.484.000,00	4.480.706.000,00	9.632.190.000,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.326.777.000,00	3.935.724.200,00	6.262.501.200,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.606.024.000,00	2.831.749.800,00	5.437.773.800,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.671.336.000,00	8.689.459.000,00	17.360.795.000,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.881.325.000,00	2.659.724.000,00	7.541.049.000,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.750.279.000,00	8.417.906.000,00	19.013.842.800,00	27.431.748.800,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.344.317.000,00	4.210.354.800,00	5.554.671.800,00
13	SATPOL PP		3.170.540.000,00	1.758.608.500,00	4.929.148.500,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.865.393.000,00	5.836.100.000,00	7.701.493.000,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.938.425.000,00		8.938.425.000,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		665.117.000,00		665.117.000,00
17	SETDA	2.733.411.000,00	12.192.620.000,00	27.870.361.079,00	40.062.981.079,00
18	SEKRETARIAT DPRD		3.329.271.000,00	17.410.623.000,00	20.739.894.000,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.329.564.210.829,00	231.672.809.271,00	12.195.108.100,00	243.867.917.371,00
a	(SKPD)	59.390.032.829,00	13.948.860.000,00	12.195.108.100,00	26.143.968.100,00
b	(PPKD)	1.270.174.178.000,00	217.723.949.271,00		217.723.949.271,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.206.111.000,00	6.822.730.000,00	10.028.841.000,00
21	BKD		3.171.363.000,00	5.420.090.550,00	8.591.453.550,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.246.125.000,00	1.166.820.000,00	2.412.945.000,00
23	KECAMATAN REMBANG		4.808.377.000,00	1.031.725.600,00	5.840.102.600,00
24	KECAMATAN KALIORI		1.920.241.000,00	540.772.400,00	2.461.013.400,00
25	KECAMATAN SULANG		1.632.257.000,00	1.022.447.600,00	2.654.704.600,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.640.072.000,00	645.180.000,00	2.285.252.000,00
27	KECAMATAN BULU		1.424.427.000,00	636.993.000,00	2.061.420.000,00
28	KECAMATAN LASEM		1.837.062.000,00	695.777.600,00	2.532.839.600,00
29	KECAMATAN PANCUR		1.963.192.000,00	590.873.000,00	2.554.065.000,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.507.693.000,00	570.648.000,00	2.078.341.000,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.498.505.000,00	494.052.000,00	1.992.557.000,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.489.497.000,00	528.921.000,00	2.018.418.000,00
33	KECAMATAN SALE		1.413.512.000,00	827.985.000,00	2.241.497.000,00
34	KECAMATAN KRAGAN		1.872.986.000,00	805.290.200,00	2.678.276.200,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.617.887.000,00	335.665.000,00	1.953.552.000,00
36	KECAMATAN SARANG		1.743.522.000,00	547.120.000,00	2.290.642.000,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.785.546.000,00	2.685.547.000,00	4.471.093.000,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000,00	5.826.423.000,00	57.920.312.827,00	63.746.735.827,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.885.418.000,00	5.194.374.200,00	13.079.792.200,00
40	DINAS ESDM		2.161.133.000,00	13.400.877.000,00	15.562.010.000,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.058.000.000,00	2.465.850.000,00	9.170.553.000,00	11.636.403.000,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.380.992.500,00	3.743.249.000,00	28.398.801.634,00	32.142.050.634,00
	JUMLAH	1.455.130.917.329,00	977.776.151.430,00	673.023.266.233,00	1.650.799.417.663,00

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	REALISASI		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	7	8	9	10=8+9
1	DINAS PENDIDIKAN		457.240.954.419,00	26.930.784.465,00	484.171.738.884,00
2	DINAS KESEHATAN	34.434.834.525,00	36.774.442.290,00	50.225.404.326,00	86.999.846.616,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	62.202.971.816,80	22.831.518.886,00	69.739.080.663,74	92.570.599.549,74
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.834.922.651,00	13.164.797.059,00	54.753.380.491,00	67.918.177.550,00
5	BAPPEDA		3.118.043.366,00	7.532.171.509,00	10.650.214.875,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.996.632.140,00	4.992.466.675,00	4.149.815.320,00	9.142.281.995,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.244.185.948,00	3.597.069.975,00	5.841.255.923,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.531.479.659,00	2.663.062.197,00	5.194.541.856,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.112.994.079,00	8.160.304.379,00	16.273.298.458,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.709.386.635,00	2.359.507.120,00	7.068.893.755,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.947.924.735,00	8.171.061.601,00	5.080.904.683,00	13.251.966.284,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.299.912.725,00	4.083.635.331,00	5.383.548.056,00
13	SATPOL PP		3.079.250.733,00	1.681.589.575,00	4.760.840.308,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.804.288.655,00	3.413.668.950,00	5.217.957.605,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.792.586.435,00		8.792.586.435,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		424.932.770,00		424.932.770,00
17	SETDA	2.758.301.940,00	11.631.816.234,00	25.345.692.549,00	36.977.508.783,00
18	SEKRETARIAT DPRD		3.215.896.019,00	13.659.867.426,00	16.875.763.445,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.286.394.306.230,00	199.945.232.968,00	10.300.458.242,00	210.245.691.210,00
a	(SKPD)	70.566.531.601,00	11.689.550.381,00	10.300.458.242,00	21.990.008.623,00
b	(PPKD)	1.215.827.774.629,00	188.255.682.587,00		138.255.682.587,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.023.337.216,00	6.277.235.705,00	9.300.572.921,00
21	BKD		3.043.014.710,00	5.175.166.826,00	8.218.181.536,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.208.507.205,00	1.090.173.746,00	2.298.680.951,00
23	KECAMATAN REMBANG		4.628.544.440,00	995.784.345,00	5.624.328.785,00
24	KECAMATAN KALIORI		1.838.571.320,00	469.534.510,00	2.308.105.830,00
25	KECAMATAN SULANG		1.580.583.303,00	718.423.657,00	2.299.006.960,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.592.868.673,00	572.192.745,00	2.165.061.418,00
27	KECAMATAN BULU		1.378.301.755,00	632.007.100,00	2.010.308.855,00
28	KECAMATAN LASÉM		1.768.966.655,00	537.732.950,00	2.306.699.605,00
29	KECAMATAN PANCUR		1.903.973.557,00	513.371.432,00	2.417.344.989,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.464.226.542,00	496.359.139,00	1.960.585.681,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.448.598.562,00	411.876.000,00	1.860.474.562,00
32	KECAMATAN GJUNEM		1.442.378.037,00	456.367.314,00	1.898.745.351,00
33	KECAMATAN SALE		1.370.481.279,00	726.384.100,00	2.096.865.379,00
34	KECAMATAN KRAGAN		1.779.372.332,00	728.300.300,00	2.507.672.632,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.565.134.937,00	313.165.200,00	1.878.300.137,00
36	KECAMATAN SARANG		1.688.008.358,00	478.122.500,00	2.166.130.858,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.730.769.122,00	2.356.565.123,00	4.087.334.245,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	136.687.000,00	5.620.601.097,00	18.431.879.511,00	24.052.480.608,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.615.160.613,00	3.438.469.000,00	11.053.629.613,00
40	DINAS ESDM		2.076.224.721,00	9.579.273.208,00	11.655.497.929,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.064.992.000,00	2.384.044.802,00	6.540.044.880,00	8.924.089.682,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.178.961.448,00	3.625.966.272,00	6.780.191.211,00	10.406.157.483,00
	JUMLAH	1.408.950.534.485,80	849.862.882.664,00	361.395.017.703,74	1.211.257.900.367,74

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	11=7-3	12=8-4	13=9-5	14=12+13
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(89.327.241.740,00)	(47.730.478.535,00)	(137.057.720.275,00)
2	DINAS KESEHATAN	673.146.525,00	(1.061.250.710,00)	(8.928.528.335,00)	(9.989.779.045,00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(5.297.028.183,20)	(631.226.114,00)	(11.705.622.898,26)	(12.336.849.012,26)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	179.922.651,00	(418.078.941,00)	(144.532.568.629,00)	(144.950.647.570,00)
5	BAPPEDA	-	(114.805.634,00)	(599.328.491,00)	(714.134.125,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	402.768.140,00	(159.017.325,00)	(330.890.680,00)	(489.908.005,00)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	(82.591.052,00)	(338.654.225,00)	(421.245.277,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(74.544.341,00)	(168.687.603,00)	(243.231.944,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(558.341.921,00)	(529.154.621,00)	(1.087.496.542,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(171.938.365,00)	(300.216.880,00)	(472.155.245,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	197.645.735,00	(246.844.399,00)	(13.932.938.117,00)	(14.179.782.516,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(44.404.275,00)	(126.719.469,00)	(171.123.744,00)
13	SATPOI. PP	-	(91.289.267,00)	(77.018.925,00)	(168.308.192,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(61.104.345,00)	(2.422.431.050,00)	(2.483.535.395,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(145.838.565,00)	-	(145.838.565,00)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(240.184.230,00)	-	(240.184.230,00)
17	SETDA	24.890.940,00	(560.803.766,00)	(2.524.668.530,00)	(3.085.472.296,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	(113.374.981,00)	(3.750.755.574,00)	(3.864.130.555,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(43.169.904.599,00)	(31.727.576.303,00)	(1.894.649.858,00)	(33.622.226.161,00)
a	(SKPD)	11.176.498.772,00	(2.259.309.619,00)	(1.894.649.858,00)	(4.153.959.477,00)
b	(PPKD)	(54.346.403.371,00)	(29.468.266.684,00)	-	(29.468.266.684,00)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(182.773.784,00)	(545.494.295,00)	(728.268.079,00)
21	BKD	-	(128.348.290,00)	(244.923.724,00)	(373.272.014,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(37.617.795,00)	(76.646.254,00)	(114.264.049,00)
23	KECAMATAN REMBANG	-	(179.832.560,00)	(35.941.255,00)	(215.773.815,00)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(81.669.680,00)	(71.237.890,00)	(152.907.570,00)
25	KECAMATAN SULANG	-	(51.673.697,00)	(304.023.943,00)	(355.697.640,00)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(47.203.327,00)	(72.987.255,00)	(120.190.582,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(46.125.245,00)	(4.985.900,00)	(51.111.145,00)
28	KECAMATAN LASEM	-	(68.095.345,00)	(158.044.650,00)	(226.139.995,00)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(59.218.443,00)	(77.501.568,00)	(136.720.011,00)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(43.466.458,00)	(74.288.861,00)	(117.755.319,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(49.906.438,00)	(82.176.000,00)	(132.082.438,00)
32	KECAMATAN GUNEM	-	(47.118.963,00)	(72.553.686,00)	(119.672.649,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(43.030.721,00)	(101.600.900,00)	(144.631.621,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(93.613.668,00)	(76.989.900,00)	(170.603.568,00)
35	KECAMATAN SEDAN	-	(52.752.063,00)	(22.499.800,00)	(75.251.863,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(55.513.642,00)	(68.997.500,00)	(124.511.142,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(54.776.878,00)	(328.981.877,00)	(383.758.755,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	3.215.000,00	(205.821.903,00)	(39.488.433.316,00)	(39.694.255.219,00)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	(270.257.387,00)	(1.755.905.200,00)	(2.026.162.587,00)
40	DINAS ESDM	-	(84.908.279,00)	(3.821.603.792,00)	(3.906.512.071,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.992.000,00	(81.805.198,00)	(2.630.508.120,00)	(2.712.313.318,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	797.968.948,00	(117.282.728,00)	(21.618.610.423,00)	(21.735.893.151,00)
	JUMLAH	(46.180.382.843,20)	(127.913.268.766,00)	(311.628.248.529,26)	(439.541.517.295,26)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		%			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
1	2	15	16	17	18
1	DINAS PENDIDIKAN		83,66	36,07	77,94
2	DINAS KESEHATAN	101,99	97,20	84,91	89,70
3	RSUD dr R. SOETRASNO	92,15	97,31	85,63	88,24
4	DINAS PEKERJAAN UMLM	103,87	95,92	27,47	31,91
5	BAPPEDA		95,45	92,63	93,72
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	125,27	95,91	92,62	94,31
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			91,40	93,27
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		97,14	94,04	95,53
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		93,56	93,91	93,74
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		96,48	88,71	93,74
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	107,19	97,07	26,72	48,31
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		96,70	96,99	96,92
13	SATPOL PP		97,12	95,62	96,59
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		96,72	58,49	67,75
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		98,37		98,37
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		63,89		63,89
17	SETDA	100,91	95,40	90,94	92,30
18	SEKRETARIAT DPRD		96,59	78,46	81,37
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	96,75	86,31	84,46	86,21
a	(SKPD)	118,82	83,80	84,46	84,11
b	(PPKD)	95,72	86,47		86,47
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		94,30	92,00	92,74
21	BKD		95,95	95,48	95,66
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU			93,43	95,26
23	KECAMATAN REMBANG		96,26	96,52	96,31
24	KECAMATAN KALICORI		95,75	86,83	93,79
25	KECAMATAN SULANG		96,83	70,27	86,60
26	KECAMATAN SUMBER		97,12	88,66	94,74
27	KECAMATAN BULU		96,76	99,22	97,52
28	KECAMATAN LASEM		96,29	77,29	91,07
29	KECAMATAN PANCUR		96,98	86,88	94,65
30	KECAMATAN SLUKE		97,12	86,96	94,33
31	KECAMATAN PAMOTAN		96,67	83,37	93,37
32	KECAMATAN GUNEM		95,84	86,28	94,07
33	KECAMATAN SALE		95,96	87,73	93,55
34	KECAMATAN KRAGAN		95,00	90,44	93,63
35	KECAMATAN SEDAN		93,74	93,30	96,15
36	KECAMATAN SARANG		95,82	87,39	94,56
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		95,93	87,75	91,42
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	102,41	95,47	31,82	37,73
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN			66,20	84,51
40	DINAS ESDM		95,07	71,48	74,90
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	100,66	93,68	71,32	76,69
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	107,01	95,87	23,87	32,38
	JUMLAH	96,83	85,92	53,70	73,37

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		MENJADI			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
1	2	19	20	21	22=20+21
1	DINAS PENDIDIKAN		457.240.954.419,00	26.930.784.465,00	484.171.738.884,00
2	DINAS KESEHATAN	34.434.834.525,00	36.774.442.290,00	50.225.404.326,00	86.999.846.616,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	62.202.971.816,80	22.831.518.886,00	69.739.080.663,74	92.570.599.549,74
4	DINAS PEKERJAAN UMLM	4.834.922.651,00	13.164.797.059,00	54.753.380.491,00	67.918.177.550,00
5	BAPPEDA		3.118.043.366,00	7.532.171.509,00	10.650.214.875,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFOPMATIKA	1.996.632.140,00	4.992.466.675,00	4.149.815.320,00	9.142.281.995,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.244.185.948,00	3.597.069.975,00	5.841.255.923,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.531.479.659,00	2.663.062.197,00	5.194.541.856,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.112.994.079,00	8.160.304.379,00	16.273.298.458,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.709.386.635,00	2.359.507.120,00	7.068.893.755,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.947.924.735,00	8.171.061.601,00	5.080.904.683,00	13.251.966.284,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.299.912.725,00	4.083.635.331,00	5.383.548.056,00
13	SATPOL PP		3.079.250.733,00	1.681.589.575,00	4.760.840.308,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.804.288.655,00	3.413.668.950,00	5.217.957.605,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.792.586.435,00		8.792.586.435,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		424.932.770,00		424.932.770,00
17	SETDA	2.758.301.940,00	11.631.816.234,00	25.345.692.549,00	36.977.508.783,00
18	SEKRETARIAT DPRD		3.215.896.019,00	13.659.867.426,00	16.875.763.445,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.286.394.306.230,00	199.945.232.968,00	10.300.458.242,00	210.245.691.210,00
a	(SKPD)	70.566.531.601,00	11.689.550.381,00	10.300.458.242,00	21.990.008.623,00
b	(PPKD)	1.215.827.774.629,00	188.255.682.587,00		188.255.682.587,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.023.337.216,00	6.277.235.705,00	9.300.572.921,00
21	BKD		3.043.014.710,00	5.175.166.826,00	8.218.181.536,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.208.507.205,00	1.090.173.746,00	2.298.680.951,00
23	KECAMATAN REMBANG		4.628.544.440,00	995.784.345,00	5.624.328.785,00
24	KECAMATAN KALIORI		1.838.571.320,00	469.534.510,00	2.308.105.830,00
25	KECAMATAN SULANG		1.580.583.303,00	718.423.657,00	2.299.006.960,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.592.868.673,00	572.192.745,00	2.165.061.418,00
27	KECAMATAN BULU		1.378.301.755,00	632.007.100,00	2.010.308.855,00
28	KECAMATAN LASEM		1.768.966.655,00	537.732.950,00	2.306.699.605,00
29	KECAMATAN PANCUR		1.903.973.557,00	513.371.432,00	2.417.344.989,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.464.226.542,00	496.359.139,00	1.960.585.681,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.448.598.562,00	411.876.000,00	1.860.474.562,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.442.378.037,00	456.367.314,00	1.898.745.351,00
33	KECAMATAN SALE		1.370.481.279,00	726.384.100,00	2.096.865.379,00
34	KECAMATAN KRAGAN		1.779.372.332,00	728.300.300,00	2.507.672.632,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.565.134.937,00	313.165.200,00	1.878.300.137,00
36	KECAMATAN SARANG		1.688.008.358,00	478.122.500,00	2.166.130.858,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.730.769.122,00	2.356.565.123,00	4.087.334.245,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	136.687.000,00	5.620.601.097,00	18.431.879.511,00	24.052.480.608,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.615.160.613,00	3.438.469.000,00	11.053.629.613,00
40	DINAS ESDM		2.076.224.721,00	9.579.273.208,00	11.655.497.929,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.064.992.000,00	2.384.044.802,00	6.540.044.880,00	8.924.089.682,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.178.961.448,00	3.625.966.272,00	6.780.191.211,00	10.406.157.483,00
	JUMLAH	1.408.950.534.485,80	849.862.882.664,00	361.395.017.703,74	1.211.257.900.367,74

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	23=19-3	24=20-4	25=21-5	26=24+25
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(89.327.241.740,00)	(47.730.478.535,00)	(137.057.720.275,00)
2	DINAS KESEHATAN	673.146.525,00	(1.061.250.710,00)	(8.928.528.335,00)	(9.989.779.045,00)
3	RSi/D dr R. SOETRASNO	(5.297.028.183,20)	(631.226.114,00)	(11.705.622.898,26)	(12.336.849.012,26)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	179.922.651,00	(418.078.941,00)	(144.532.568.629,00)	(144.950.647.570,00)
5	BAPPEDA	-	(114.805.634,00)	(599.328.491,00)	(714.134.125,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	402.768.140,00	(159.017.325,00)	(330.890.680,00)	(489.908.005,00)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	(82.591.052,00)	(338.654.225,00)	(421.245.277,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(74.544.341,00)	(168.687.603,00)	(243.231.944,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(558.341.921,00)	(529.154.621,00)	(1.087.496.542,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(171.938.365,00)	(300.216.880,00)	(472.155.245,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	197.645.735,00	(246.844.399,00)	(13.932.938.117,00)	(14.179.782.516,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(44.404.275,00)	(126.719.469,00)	(171.123.744,00)
13	SATPOL PP	-	(91.289.267,00)	(77.018.925,00)	(168.308.192,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(61.104.345,00)	(2.422.431.050,00)	(2.483.535.395,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(145.838.565,00)	-	(145.838.565,00)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(240.184.230,00)	-	(240.184.230,00)
17	SETDA	24.890.940,00	(560.803.766,00)	(2.524.668.530,00)	(3.085.472.296,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	(113.374.981,00)	(3.750.755.574,00)	(3.864.130.555,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(43.169.904.599,00)	(31.727.576.303,00)	(1.894.649.858,00)	(33.622.226.161,00)
a	(SKPD)	11.176.498.772,00	(2.259.309.619,00)	(1.894.649.858,00)	(4.153.959.477,00)
b	(PPKD)	(54.346.403.371,00)	(29.468.266.684,00)	-	(29.468.266.684,00)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(182.773.784,00)	(545.494.295,00)	(728.268.079,00)
21	BKD	-	(128.348.290,00)	(244.923.724,00)	(373.272.014,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(37.617.795,00)	(76.646.254,00)	(114.264.049,00)
23	KECAMATAN REMBANG	-	(179.832.560,00)	(35.941.255,00)	(215.773.815,00)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(81.669.680,00)	(71.237.890,00)	(152.907.570,00)
25	KECAMATAN SULANG	-	(51.673.697,00)	(304.023.943,00)	(355.697.640,00)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(47.203.327,00)	(72.987.255,00)	(120.190.582,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(46.125.245,00)	(4.985.900,00)	(51.111.145,00)
28	KECAMATAN LASEM	-	(68.095.345,00)	(158.044.650,00)	(226.139.995,00)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(59.218.443,00)	(77.501.568,00)	(136.720.011,00)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(43.466.458,00)	(74.288.861,00)	(117.755.319,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(49.906.438,00)	(82.176.000,00)	(132.082.438,00)
32	KECAMATAN GUNEM	-	(47.118.963,00)	(72.553.686,00)	(119.672.649,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(43.030.721,00)	(101.600.900,00)	(144.631.621,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(93.613.668,00)	(76.989.900,00)	(170.603.568,00)
35	KECAMATAN SEDAN	-	(52.752.063,00)	(22.499.800,00)	(75.251.863,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(55.513.642,00)	(68.997.500,00)	(124.511.142,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(54.776.878,00)	(328.981.877,00)	(383.758.755,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	3.215.000,00	(205.821.903,00)	(39.488.433.316,00)	(39.694.255.219,00)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	(270.257.387,00)	(1.755.905.200,00)	(2.026.162.587,00)
40	DINAS ESDM	-	(84.908.279,00)	(3.821.603.792,00)	(3.906.512.071,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.992.000,00	(81.805.198,00)	(2.630.508.120,00)	(2.712.313.318,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	797.968.948,00	(117.282.728,00)	(21.618.610.423,00)	(21.735.893.151,00)
	JUMLAH	(46.180.382.843,20)	(127.913.268.766,00)	(311.628.248.529,26)	(439.541.517.295,26)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		%			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
1	2	27	28	29	30
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	DINAS PENDIDIKAN		83,66	36,07	77,94
2	DINAS KESEHATAN	101,99	97,20	84,91	89,70
3	RSUD dr R. SOETRASNO	92,15	97,31	85,63	88,24
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	103,87	96,92	27,47	31,91
5	BAPPEDA		96,45	92,63	93,72
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	125,27	96,91	92,62	94,91
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		96,45	91,40	93,27
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		97,14	94,04	95,53
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		93,56	93,91	93,74
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		96,48	88,71	93,74
11	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK.M	107,19	97,07	26,72	48,31
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		96,70	96,99	96,92
13	SATPOL PP		97,12	95,62	96,59
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		96,72	58,49	67,75
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		98,37		98,37
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		63,89		63,89
17	SETDA	100,91	95,40	90,94	92,30
18	SEKRETARIAT DPRD		96,59	78,46	81,37
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	96,75	86,31	84,46	86,21
a	(SKPD)	118,82	83,80	84,46	84,11
b	(PPKD)	95,72	86,47		86,47
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		94,30	92,00	92,74
21	BKD		95,95	95,48	95,66
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		96,98	93,43	95,26
23	KECAMATAN REMBANG		96,26	96,52	96,31
24	KECAMATAN KALIORI		95,75	86,83	93,79
25	KECAMATAN SULANG		96,83	70,27	86,60
26	KECAMATAN SUMBER		97,12	88,69	94,74
27	KECAMATAN BULU		96,76	99,22	97,52
28	KECAMATAN LASEM		96,29	77,29	91,07
29	KECAMATAN PANCUR		96,98	86,88	94,65
30	KECAMATAN SLUKE		97,12	86,98	94,33
31	KECAMATAN PAMOTAN		96,67	83,37	93,37
32	KECAMATAN GUNEM		96,84	86,28	94,07
33	KECAMATAN SALE		96,96	87,73	93,55
34	KECAMATAN KRAGAN		95,00	90,44	93,63
35	KECAMATAN SEDAN		96,74	93,30	96,15
36	KECAMATAN SARANG		96,82	87,39	94,56
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		96,93	87,75	91,42
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	102,41	96,47	31,82	37,73
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		96,57	66,20	84,51
40	DINAS ESDM		96,07	71,48	74,90
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	100,66	96,68	71,32	76,69
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	107,01	96,87	23,87	32,38
	JUMLAH	96,83	86,92	53,70	73,37

B. REKOMENDASI

1. Setelah melakukan pembahasan, beberapa SKPD banyak yang mengeluhkan kekurangan tenaga SDM, sehubungan hal tersebut dimohon Pemerintah Kabupaten Rembang segera memenuhi kekurangan tenaga pada SKPD-SKPD tersebut (Satpol PP, Dinas PU, Dinas Pendidikan Bidang Pengendalian Mutu)
2. Agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) segera melakukan penghapusan gedung lama Kecamatan Lasem
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembuatan KTP kepada masyarakat, agar SKPD yang terkait dgn proses penerbitan KTP untuk dapat selalu berkordinasi.
4. Amanat PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan segera diterbitkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukan PP tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera memasukkan Raperda tersebut ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama
5. Berdasarkan hasil LHP BPK atas laporan keuangan Kabupaten Rembang Tahun 2015 terdapat potensi kehilangan penerimaan atas lelang tertutup di TPI Tasik Agung sebesar Rp. 2.425.702.426,-. Untuk itu agar Saudara Bupati meninjau kembali sistem lelang tertutup pada TPI Tasik Agung, TPI Tunggulsari, TPI Pasar Banggi, TPI Pangkalan dan TPI Karang Lincak
6. Dengan akan diberlakukannya pelarangan kapal cantrang pada akhir bulan Desember Tahun 2016, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera mencari solusi atas permasalahan tersebut
7. Agar petani tidak mengalami gagal panen lagi, dan bisa menikmati harga jual khususnya hortikultura, maka Pemerintah Kabupaten Rembang perlu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif melalui SKPD terkait agar harga jual hasil panen mampu meningkatkan kesejahteraan petani
8. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang lebih serius merencanakan pembangunan bendungan sungai-sungai sehingga tidak sekedar menjadi wacana. Karena bendungan merupakan unsur penting sebagai penunjang keberhasilan bidang pertanian dengan memperhatikan sumber alam yang ada

9. Dengan ditetapkannya Desa Criwik Kec. Pancur sebagai Desa Agrowisata yang mengandalkan hasil ciri khas buah durian, agar Pemerintah Kabupaten Rembang lebih serius dalam melakukan pembinaan dan pengadaan bibit durian serta bibit-bibit buah yang lain yang cocok dengan lahan pertanian di Desa Criwik sebagai pendukung untuk keberhasilan program tersebut
10. DPRD merespon positif atas pengembangan tanaman hortikultura yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan. Namun demikian DPRD Kabupaten Rembang tetap berharap banyak kepada Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih meningkatkan pembinaan dan mengembangkan tanaman hortikultura yang sesuai dengan kondisi iklim dan lahan pertanian di Kabupaten Rembang
11. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang mendorong BUMD sebagai penyangga hasil petani garam dan petani hortikultura
12. Terkait penarikan retribusi pedagang pasar yang berada di pinggir jalan terjadi tumpang tindih antara Disperindakop dan Dishubkominfo. Demikian juga tentang besaran retribusi parkir di Lingkungan Rumah Sakit dr. R. Soetrasno Rembang terjadi ketidakpastian. Oleh karena itu agar Saudara Bupati Rembang mengambil sikap tegas dan jelas agar terjadi kepastian baik menyangkut kewenangan maupun besarnya
13. DPRD mencatat ada lima minimarket yang belum memiliki izin oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rembang perlu mengambil langkah-langkah tegas bahkan bisa jadi sampai melakukan penyegelan.
14. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang harus menghitung segala aspek sehingga pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, karena banyak ditemui perencanaan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala oleh beberapa aspek termasuk aspek lokasi yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan
15. Seringnya DPRD mendapatkan informasi yang berbeda dari Pejabat di lingkungan DPU Kabupaten Rembang yang menunjukkan tidak adanya pemahaman yang sama di internal, oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Kepala Dinas dan Kepala Bidangnyanya serta SKPD yang lain, agar informasi yang disampaikan valid dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar

16. Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa sebagian besar pembangunan fisik dan infrastruktur di berbagai SKPD tidak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh keterlambatan atau tidak diperolehnya pengesahan perencanaan dari Dinas PU. Oleh karena itu Bupati Rembang perlu mengambil langkah-langkah strategis agar kejadian yang sama tidak terulang kembali sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
17. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan penertiban pungutan retribusi di tingkat desa, dikarenakan banyak pungutan retribusi di tingkat desa terutama yang menyangkut galian C dikenakan melebihi ketentuan Peraturan Daerah
18. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menyiapkan pelaksanaan Pilkades karena saat ini banyak Kepala Desa banyak dijabat oleh Pj. Sehingga sedikit banyak menghambat beberapa kegiatan pembangunan yang membutuhkan Kepala Desa secara definitif termasuk pengisian perangkat desa yang masih banyak yang lowong
19. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menerbitkan Peraturan Bupati terkait Bantuan Keuangan Desa termasuk sosialisasinya kepada stakeholder yang ada terutama pada tingkat kecamatan
20. Terkait dengan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang selama ini tupoksi terbagi dalam beberapa SKPD, agar dipusatkan dalam satu SKPD sehingga pelayanan dapat berjalan optimal
21. Pemerintah Kabupaten Rembang diminta untuk meningkatkan sosialisasi terkait dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikarenakan masih belum tersalurkannya bantuan kepada yang berhak menerima
22. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui RSUD dr. R. Soetrasno agar bisa menambah jumlah dokter jaga minimal 1 (satu) orang dokter per blok agar pelayanan dapat lebih baik
23. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Rembang, Bupati Rembang agar memperingatkan para dokter praktek yang menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas BPJS

24. Menghimbau kepada Saudara Bupati agar membantu penyelesaian permasalahan Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI) pada Tempat Pelelangan Ikan se Kabupaten Rembang
25. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DPU segera menyusun dan menetapkan status jalan kabupaten
26. Terkait dengan pemanfaatan air embung panohan Pemerintah Kabupaten Rembang segera melakukan langkah-langkah dengan pihak-pihak terkait yang menyangkut pembebasan lahan embung panohan

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 27 Juli 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua,

Sekretaris

Ttd

ttd

H. GUNASIH S.E.

Drs. ACHMAD MUALIF

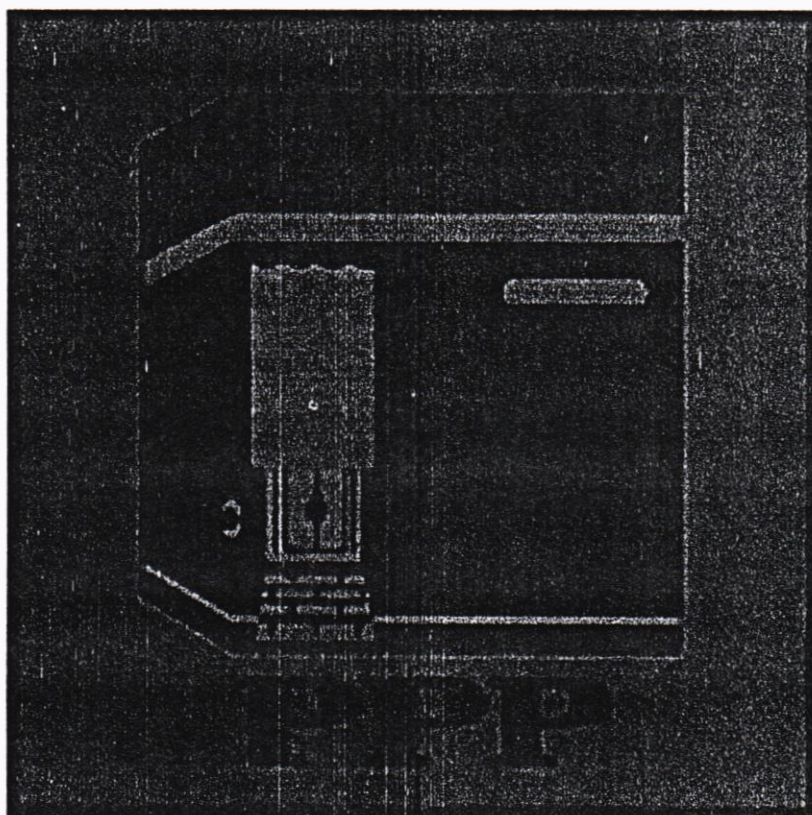
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembiha Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2015



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI: KAMIS, TANGGAL: 28 Juli 2016

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2015

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah, Wassholatu wassalamu a'laa Rosulillah ibni Abdillah, Wa a'la alihi Washohbihi wamanwalah..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- sdr. PJ Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2015, meskipun banyak adanya catatan yang kurang baik, akibat adanya SILPA yang sangat besar, pada penutupan ahir Tahun Anggaran 2015.

Terima kasih dan apresiasi juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal rencana yang ada . Mulai dari Penyampaian nota keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015 oleh sdr. Bupati , sampai Pembahasan ditingkat komisi bersama SKPD, dan juga Banggar bersama TAPD.

Sdr. Bupati dan sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum pendapat akhir ini kami sampaikan, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan sebagai masukan, saran dan himbauan , sebagai berikut :

1. Melihat realisasi APBD 2015, dimana terdapat SILPA yang sangat tinggi, atau progress penyerapan Anggaran sangat rendah, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, yakni penyerapan Anggaran Belanja Langsung hanya 27,47 % . Padahal Dinas P.U. adalah, SKPD Teknis yang juga sebagai pemegang peran utama pada kegiatan infra struktur SKPD yang lain . Maka sehubungan dengan hal tersebut, kami dari F-PPP mohon, agar sdr. Bupati mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, agar dengan sisa waktu yang ada ini, Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, SILPA dapat ditekan seminim mungkin.
2. Mohon kepada sdr. Bupati, agar Refisi Perbup no. 36 tahun 2015, tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada PEMDES, segera dapat diselesaikan, supaya anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa APBD tahun 2016, tidak terhambat dan dapat direalisasikan.
3. Mengingat banyak PJ Kades yang sudah terlalu lama, yakni sudah hampir 2 (dua) tahun, dan banyaknya kekosongan perangkat desa, yang mestinya segera harus dilakukan pengisian, Maka untuk keperluan hal tersebut, mohon agar segera diterbitkan PERKADA , yang mengatur tentang Pemilihan /pengangkatan Kepala desa dan Perangkat Desa.

4. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak terkait, dan dengan pemangku kepentingan, tentang operasional karaoke, kami Fraksi PPP minta, agar Pemkab tetap komitmen, tidak menambah ijin operasi usaha karaoke yang baru, terlebih khususnya yang di lokasi ex kantor Dishubkominfo, sampai terbitnya refisi Perda no 8 tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.
5. Berkenaan dengan sudah selama 4 tahun, predikat Adipura di Pemkab Rembang terlepas, dan sesuai pidato sdr. Bupati, pada peringatan hari jadi kota Rembang kemarin, bahwa Adipura harus kita peroleh lagi pada tahun 2017, untuk program tersebut, kami dari Fraksi PPP setuju dan mendorong, agar semangat kinerja Pemkab Rembang lebih ditingkatkan demi tercapainya tujuan tersebut.
6. Kami dari F-PPP mohon, kepada sdr. Bupati, agar segera memerintahkan TAPD, untuk menyusun dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2016, untuk segera ditindak lanjuti dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 secara keseluruhan, menyampaikan pendapat akhir bahwa, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim " MENERIMA DAN MENYETUJUI " RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2015, untuk ditetapkan menjadi PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2015.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2015, untuk dijadikan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2015.

Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq....., Wassalamu a'laikum Wr..... Wb.....

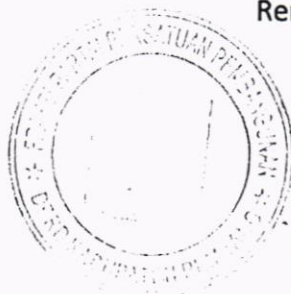
**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 28 Juli 2016

KETUA



SUGIHARTO

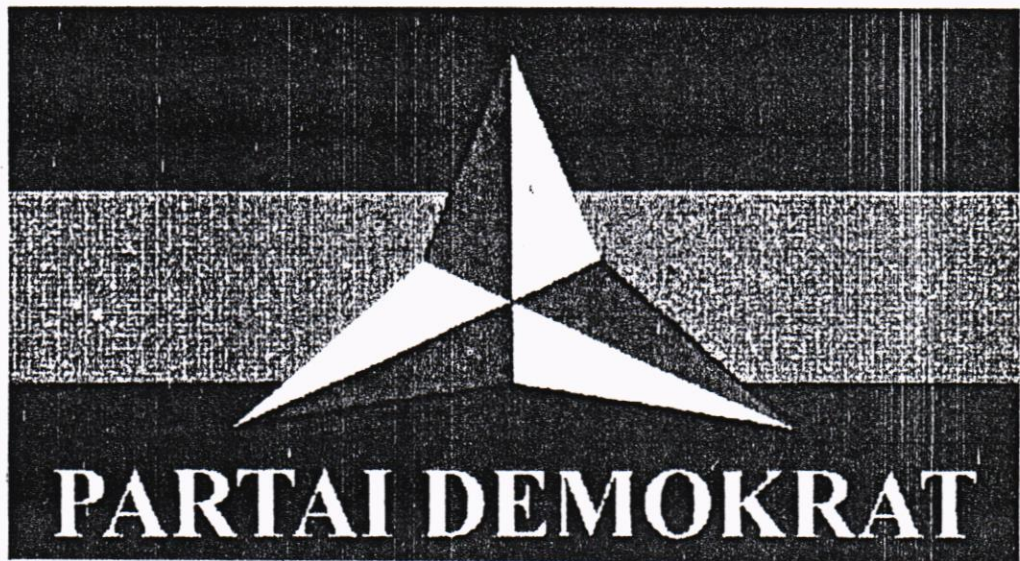


SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 28 JULI 2016

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, SE., MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194, 693290, 693291

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

KAMIS, 28 JULI 2016

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, SE., MH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat fraksi ini, Perkenankanlah kami mengajak hadirin semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadiran

Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir mengikuti persidangan yang berbahagia ini

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami Fraksi Demokrat mengucapkan selamat hari jadi kota Rembang yang ke 275, semoga dengan bertambahnya usia kota kita tercinta ini seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Rembang dan stekholder bisa mewujudkan visi misi Kabupaten Rembang.

Bupati,Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Setelah melalui pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2015 melalui banggar dan komisi-komisi maka terlihat sangat jelas dan bisa dibayangkan karena tingkat penyerapan anggaran sangat jauh dari perencanaan. Faktor utamanya adalah semua SKPD merasa takut untuk melaksanakan kegiatan dengan berbagai alasan, Kami Fraksi Demokrat berharap tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang Kami hormati,

Ada beberapa hal yang kami mohon untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah antara lain :

1. Mohon kepala BLUD RSUD Dr. R. Soetrasno agar menegur dokter yang tidak mau visit pasien rumah sakit yang menggunakan BPJS, KIS (gratis)
2. Mohon di bantu terkait tunggakan KPLI di tempat pelelangan ikan karena sudah mengkhawatirkan
3. Mohon ditertibkan PKL yang ada di kota lasem yang sangat mengganggu anak-anak sekolah karena trotoarnya dipakai jualan
4. Mohon Anggaran yang tidak terserap ditahun sebelumnya bisa dimaksimalkan penggunaannya ditahun yang akan datang

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang Kami hormati

Ahkirnya Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohiimi Kami Fraksi Demokrat menerima dan menyetujui RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan menjadi PERDA. Demikian pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD, segenap Anggota Dewan yang terhormat serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 juli 2016

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS


EDI KARTONO, SPd, MH


Hj. HIKMAH PURNAMAWATI





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PENDAPAT *AKHIR*

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2015**

Disampaikan oleh ILYAS

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis, 28 Juli 2016

Assalamu 'alaikum Wr. wb.

Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ini, terlebih Dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri agenda pendapat akhir Fraksi-fraksi ATAS hasil pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2015 dalam Keadaan Sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun, semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

FPKB berpendapat bahwa Raperda Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2015 ada beberapa catatan :

1. Bidang Kelautan dan Perikanan :

- a. Berdasarkan hasil LHP BPK atas laporan keuangan Kab. Rembang TH. 2015 terdapat potensi kehilangan penerimaan atas lelang Tertutup di TPI Tasik Agung sebesar Rp. 2.425.702.426,- Maka, Bupati harap meninjau ulang lelang di TPI Tasikaung, TPI Tunggulsari, TPI Pasar Banggi, TPI Pangkalan dan TPI Karanglincak.
- b. Dengan akan diberlakukannya pelarangan kapal cantrang pada akhir Desember 2016 maka Pemkab Rembang harus segera mencari solusi.

2. Bidang Pertanian dan Kehutanan :

- a. Agar petani tidak mengalami gagal panen lagi dan bisa menikmati harga jual hortikultura maka pemkab harus mengkoordinasikan lintas SKPD agar nasib petani lebih baik.
- b. Pemkab harus lebih serius menangani dam parit dan jangan hanya jadi wacana saja karena dam parit merupakan unsur terpenting sebagai penunjang bidang pertanian disamping sumberdaya alam lain yang ada.
- c. Mohon pemkab segera menetapkan desa Ceriwik Kec. Pancur sebagai desa agrowisata yang mempunyai hasil unggulan buah durian dan memberikan pembinaan dan pengadaan bibit durian serta bibit-bibit yang lain yang cocok dengan pertanian di desa-desa sekitarnya sebagai pendukung keberhasilan program ini.
- d. Pemkab Rembang harus dapat mengembangkan budidaya hortikultura sesuai kondisi iklim dan lahan pertanian di Rembang.

3. Bidang Perekonomian :

- a. Agar Pemkab mendorong BUMD sebagai penyangga hasil petani garam dan Hortikultura
- b. Masalah retribusi yang terjadi double kepentingan antara Dinas Indakop dan Dishubkominfo terkait pedagang pasar yang berada di pinggir jalan agar segera diselesaikan.
- c. Pungutan retribusi parkir di RSUD Dr. Soetrasno agar Sdr Bupati mengambil sikap tegas untuk menertibkan pelaksanaannya sesuai Perda..

4. Bidang Infrastruktur :

- a. DPU harus segera mempercepat pengadaan konsultan agar penyerapan anggaran di DPU bisa maksimal
- b. Infrastruktur jalan yang menjadi tanggungjawab Pemkab harus segera diperbaiki.

5. Bidang pemerintahan :

Pembkab harus menyiapkan langkah-langkah strategis dan sistematis agar pelaksanaan pilkades serentak dan pengisian perangkat desa bisa dilaksanakan tahun ini.

Dengan diterbitkannya PP No. 18 Th. 2016 tentang perangkat daerah yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan perda paling lambat 6 bulan setelah PP diberlakukan, Pemkab harus segera menyusun draft

Perda tentang Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi Kab. Rembang serta sejalan dengan Visi-Misi Bupati. Jangan sampai Perangkat Daerah yang terbentuk besok tidak sesuai dengan kondisi Rembang sehingga SKPD kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

6. Bidang Pendidikan :

- Agar Pemkab segera menindak lanjuti laporan penyelewengan dana DAK di Dinas Pendidikan yang saat di laporkan di kejadi Jawa Tengah.

Dengan mengucapkan BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, Kami menerima hasil pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2015 dengan beberapa catatan yang sudah kami sampaikan.

Semoga Allah selalu Meridhoi apa yang kami lakukan utuk masyarakat Rembang

Akhirnya kepada saudara bupati beserta seluruh jajarannya dapat melaksanakan apa yang menjadi pendapat kami ini, serta mengucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini kepada semuanya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun Masyarakat, bangsa dan Negara. Selamat menyambut HUT kemerdekaan ke 71 Republik Indonesia... NKRI HARGA MATI.

Sekian Kurang Lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq Wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**



MOHAMMAD IMRON
Ketua



ILYAS
sekretaris



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanggal : 28 Juli 2016

Tentang : RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2015

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab. Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Sebelum kami membacakan pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem , terlebih dahulu kami mengucapkan HUT Kabupaten Rembang yang ke – 275 pada tanggal 27 Juli kemarin. Semoga kedepan Kabupaten Rembang akan semakin maju, sejahtera rakyatnya, aman dan tenteram.

Setelah dilaksanakan pembahasan kemarin bersama SKPD – SKPD di tingkat komisi, kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mempunyai pendapat sebagai berikut :

1. Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem menilai SKPD didalam rapat dengan komisi belum siap dalam menyiapkan materi dan data yang akurat sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui secara rinci mengenai kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penyerapan anggaran yang telah disetujui. Dan kami menekankan agar semua SKPD di Pemkab Rembang ini untuk bekerja maksimal sehingga bisa menggenjot penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi SII.PA untuk tahun - tahun kedepan.
2. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong Pemkab Rembang untuk segera mengatasi adanya kekosongan perangkat yang terjadi di beberapa desa sehingga tidak menghambat proses administrasi dan pelayanan di desa tersebut.
3. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga berharap Pemkab Rembang segera menindaklanjuti penambahan kuota penerima BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.
4. Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem, menyarankan Pemkab Rembang dalam hal pengolahan sampah di kota Rembang ini di serahkan kepada dinas yang tepat dalam hal ini dinas BLH (Badan Lingkungan Hidup) bukan dibawah Dinas Pekerjaan umum (DPU) lagi sehingga penanganannya lebih maksimal. Agar di tahun yang akan datang kab. Rembang bisa meraih ADIPURA kembali.
5. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap Pemkab Rembang menambah Embung - Embung di daerah yang rawan kekeringan untuk mengatasi Anomali cuaca yang tidak bisa di prediksi sehingga para petani di Rembang yang sebagian besar mengandalkan lahan tadah hujan ini dapat terbantu, untuk meminimalisasi gagal panen.

6. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemkab Rembang tidak asal-asalan tapi harus dengan perhitungan dan mempertimbangkan semua aspek yang ada sehingga ketika dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi kendala misalnya aspek lokasi, lingkungan dll.
7. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyoroti adanya informasi yang berbeda yang kami dapatkan dari pejabat di lingkungan DPU Kab. Rembang, ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan kekompakan di internal DPU. Kami berharap semua Kepala SKPD meningkatkan koordinasi di internal SKPD tersebut agar dalam penyampaian informasi kepada kami lebih valid dan benar sehingga dapat memudahkan kami dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
8. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memohon kepada pengelola RSUD R. Soetrasno Rembang agar menugaskan dokter jaga yang selalu standby disetiap bangsal untuk mengantisipasi keadaan darurat pasien, karena ini menyangkut keselamatan nyawa seseorang. 1. Kami juga mengkritik fasilitas ruang terutama di ruang ICU yang AC nya mati/kurang dingin sehingga ada pasien yang harus membawa kipas sendiri. 2. kemudian ruang Anyelir (VIP) mohon fasilitasnya di perbaiki seperti Ac dll karena pasien butuh pelayanan yang baik dan kenyamanan. 3. Untuk para dokter agar dalam memberikan keterangan kepada pasien tidak membingungkan pasien terutama pasien BPJS. 4. Kami sarankan RSUD R. Soetrasno menggunakan Parkir elektronik agar lebih praktis dan teratur.
9. Yang terakhir, kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyarankan Saudara Bupati memberikan teguran dalam bentuk apapun kepada staf / jajarannya apabila hal- hal tersebut diatas terulang lagi yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan di Kab. Rembang ini.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat. Semoga ke depannya Pemkab Rembang beserta jajarannya lebih meningkatkan kinerjanya agar kejadian di tahun 2015 tidak terulang lagi. Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini memberikan gambaran yang positif kepada saudara Bupati beserta jajarannya serta rekan-rekan anggota DPRD kabupaten Rembang . Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat. Semoga ke depannya Pemkab Rembang beserta jajarannya lebih meningkatkan kinerjanya agar kejadian di tahun 2015 tidak terulang lagi. Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini memberikan gambaran yang positif kepada saudara Bupati beserta jajarannya serta rekan-rekan anggota DPRD kabupaten Rembang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

M E R D E K A . . . ! ! !

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA

JASMANI

SEKRETARIS


ALIRCHAM ST



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015**

Disampaikan oleh : Puji Santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 28 Juli 2016

***ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SALAM INDONESIA RAYA...***

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.
Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.
Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,
Kepala Dinas,- Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten
Rembang
Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan
Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Fraksi Gerindra mengucapkan selamat Hari Kejaksaan yang jatuh pada tanggal 22 Juli, semoga kinerjanya semakin Profesional. Selain itu kami juga mengucapkan Hari Anak Nasional yang diperingati pada tanggal 23 Juli. Anak adalah generasi penerus bangsa, marilah kita bersama-sama memberikan perlindungan, kesejahteraan dan pendidikan yang baik kepada

anak-anak kita dan yang tidak kalah pentingnya kita sebisa mungkin memberikan warisan yang baik berupa pembangunan dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Rembang agar kelak anak-anak kita bisa tersenyum. Yang berikutnya kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke 275, mari kita bersatu padu dalam membangun Rembang menuju Rembang yang Madani dan Sejahtera.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang telah didalami pada Rapat-rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran bersama dengan TAPD dan telah memunculkan Rekomendasi yang disepakati bersama.

Selain Rekomendasi tersebut, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan kritis sebagai bahan evaluasi Pemkab rembang kedepan.

1. Berdasarkan pencermatan Fraksi Gerindra bahwa kegagalan pembangunan sarana dan Prasarana di kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 adalah bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum. Diakui atau tidak diakui, fakta membuktikan bahwa capaian kinerja pada belanja langsung dari DPU sangatlah jauh dari harapan, yaitu hanya sebesar 27,47 persen. Ini merupakan prestasi yang sangat mengecewakan dan terendah sepanjang sejarah. Memang, kita tidak memungkiri bahwa ada faktor X yang membuat kinerja mereka melemah. Tetapi seharusnya para pegawainya tetap menjunjung tinggi sumpah dan janji PNS. Para pegawai seharusnya tetap bekerja secara Profesional dan bisa mengambil pengalaman dari pegawai yang terkena masalah yaitu dengan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melemah Kinerjanya atau malah mencari jalan lain yang tidak benar. Selain itu DPU juga menyebabkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di SKPD lain juga terhambat, bahkan serapan anggaran kegiatan tersebut nol persen karena DPU tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut akibatnya pekerjaan gagal dilaksanakan. Kami menegaskan bahwa Bupati

dan wakil Bupati perlu mengambil langkah-langkah strategis agar pembangunan bisa berjalan normal kembali.

2. Berkaitan dengan kinerja dari bagian Aset Pemkab Rembang yang menurut Fraksi Gerindra kinerjanya kurang maksimal dan kurang Profesional. Selain terkait proses penghapusan aset kantor lama Kecamatan Lasem yang tidak kunjung beres sejak tahun 2012, kami juga berpendapat bahwa terhambatnya perolehan opini dari BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Pemkab Rembang salah satunya disebabkan oleh Penataan aset yang masih bermasalah. Kami mendukung Pemberian Anggaran yang cukup agar masalah Aset bisa segera ditata dengan baik. Kabupaten tetangga yaitu Pati dan Kudus saja sudah memperoleh WTP, masak kita belum. Selain masalah aset, juga perlu kesesuaian laporan keuangan standar akuntansi pemerintah (SAP), efektifitas sistem pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan perlu adanya dukungan dari semua SKP selaku entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan melalui perencanaan, pelaksanaan program kegiatan sampai penatausahaan keuangan yang merupakan out put laporan keuangan SKPD.
3. Fraksi Gerindra meminta kepada Pemkab Rembang untuk melakukan Pergantian Direksi PT. RBSJ yang kinerjanya tidak menunjukkan hasil yang positif. Kesempatan sudah kita berikan cukup lama, sampai sekarang Deviden juga tidak kunjung masuk ke Kas Daerah. Bukanya tujuan utama di bentuknya BUMD adalah agar bisa memberikan keuntungan kepada Pemkab Rembang? Bukan malah memberikan masalah yang tidak kunjung selesai sampai saat ini. Kami mendukung langkah Pemkab Rembang yang telah melakukan audit atas aset dan kinerja dari PT. RBSJ. Bila Pemkab Rembang tidak mampu, maka bisa meminta BPKP untuk melakukannya. Hal ini perlu dilakukan agar keberadaan PT. RBSJ bisa berjalan sehat dan bisa memberikan pemasukan seperti BUMD-BUMD yang lainnya.
4. Kami mengingatkan bahwa APBD tahun Anggaran 2016 ini sangatlah besar dan sampai saat ini serapanya untuk belanja langsung masih belum maksimal. Waktu tersisa tinggal 5 bulan lagi dan waktu terus berjalan. SILPA APBD tahun Anggaran 2015 mencapai angka 396,6 Milyar. Itu

artinya APBD Tahun 2016 berpotensi naik, selain kenaikan dari Pendapatan Daerah, juga ada SILPA dari Tahun Anggaran sebelumnya. Banyak anggaran Induk yang belum dilaksanakan, apalagi ditambah dengan anggaran perubahan. Maka dari itu Pemkab perlu membuat strategi dan schedule waktu mulai dari pembahasan KUA-PPAS, Raperdanya sampai ke tahap Pelaksanaannya agar memperoleh waktu yang cukup. Jangan sampai anggaran ini tidak terserap kembali, itu sama artinya kita tidak mampu bekerja untuk melayani dan mensejahterakan rakyat kabupaten Rembang.

5. Kami menegaskan bahwa pentingnya segera dikeluarkannya Perbup Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Semangat kita adalah bagaimana Anggaran ditahun ini bisa terlaksana dan tidak menyisakan SILPA diatas 5 persen. Pemkab juga harus segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari proposal sampai ke pencairan dana sehingga bisa berjalan lancar.
6. Fraksi Gerindra mengajak kepada kita semua untuk melakukan "Refleksi Diri", bahwa pembangunan di kabupaten Rembang ini tidak akan terwujud bila dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja, tetapi kita harus bersatu padu, saling membantu dan saling melengkapi. Masing-masing dari kita harus bekerja dengan semangat dan profesional. Marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Jangalah diantara kita saling menjatuhkan. Allah mencintai orang yang membangun dan Allah membenci kepada orang yang membuat rusak.

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Demikian pendapat akhir kami, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim kami **dapat menerima dan menyetujui RAPERDA** Pertanggung jawaban ini ditetapkan menjadi **PERDA** Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2015. Atas segala kekurangan disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. Amiiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Juli 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PAMANGGIH PUNGKASAN
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Hasil Pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TA 2015



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PAMANGGIH PUNGKASAN FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Hasil Pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015

Ndalem Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Dinten Kemis Wage, 28 Juli 2016
Kawaos dening CATUR WINANTO, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ingkang kinormatan Sedherek Bupati Rembang saha Wakil Bupati.
- Ingkang kinormatan Sdr Pangarso dalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Ingkang kinormatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Ingkang kinormatan Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten SEKDA dalah Kepala Bagian SETDA Kabupaten Rembang.
- Ingkang kinormatan Para Pangarsaning Praja, Kepala Dinas, Badan, Kantor dalah Instansi Kabupaten Rembang
- Ingkang kinormatan Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- Ingkang kinormatan Sdr. Camat dalah para rawuh minulya saha dhangan ing penggalih.

Amiwiti adicara menika, keparenga kawula Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang ngonjukaken puji lan syukur dhateng ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Jagad, ugi ngaturaken "Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Rembang ingkang kaping-275, mugi tansah pinaringan rohmah saha berkah saking Gusti Alloh. Kawula ugi ngaturaken pangalembana ingkang kalawingi kagelar "pesta rakyat" kanthi sae, ing pangajab dipun adani saben tahun kanthi modifikasi langkung sae.

Sadherek Bupati, anggota Dewan saha para rawuh.

Sak sampunipun nglampahi pirembagan ingkang gayeng ndalem Rapat Kerja Komisi kalian SKPD saha Badan Anggaran kalian TAPD, kawula Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang badhe ngaturaken pamanggih pungkasan (pendapat akhir) atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 ingkang sampun dipun aturaken Sdr. Bupati sawetawis wekdal kepengker.

Sebagian ageng cak-cakan APBD 2015 mboten lumampah kanthi sae, ewa semanten kawula tetep ngaturaken panuwun dhumateng Pamarentah Kabupaten sak bregada. Ing ngajeng wau Badan Anggaran DPRD sampun ngaturaken rekomendasi kanthi tlesih, ewa semanten miturut

kawula wonten cathetan lan bab-bab ingkang perlu kawigatosan Sedherek Bupati, antawisipun:

1. Ing TA. 2015, kadenangan SILPA gunggungipun meh Rp. 400 milyar (sekawan atus milyar rupiah), menika mujudaken rekor SILPA ingkang kedadosan sak laminipun Pamarentah Kabupaten Rembang madeg. Serapan anggaran ingkang andhap sanget, pembangunan mboten ketingal, amargi kegiatan ingkang magepokan kalian fisik utawi belanja langsung, ingkang kedah pikantuk rekomendasi saking Dinas Pekerjaan Umum mboten pikantuk rekomendasi kanthi werni-werni alesan ingkang mboten nalar.

Masyarakat Rembang lumantar media sosial sambat bilih pembangunan ing Kabupaten Rembang kentun tebih dipun bandhingaken kalian kabupaten tetangga. Hhmmm

2. Tahun 2016 sampun 7 (pitung) wulan lumampah, nanging masyarakat dereng ngganda "aroma sedhep" pembangunan, utaminipun pembangunan infra struktur. Kamangka infrastruktur menika mujudaken urat nadi perekonomian lan pagesangan rakyat. Dalan saha kretek ingkang rusak damel ruginipun masyarakat, mitra kerja (rekanan) nggigit driji, karyawan sarta kadang tukang anangis-njerit amargi mboten pikantuk pedamelan saengga mboten saged maringi nafkan kangge kulawarganipun. Pramila kula nyuwun kanthi sanget supados Sedherek Bupati sigra tumindak, paring ukuman marang SKPD sing mbangkang, ing pangajab pembangunan bisa awujud kanthi prayogi.
3. Ing babagan Pamarentah Desa, kathah desa ing tlatah Rembang ingkang kothong prangkat desanipun. Satunggiling conto Desa Karanganyar Kecamatan Kragan, sekretaris desa kosong lan namung gadhah 1 (setunggal) perangkat desa, ngaten menika jelas layanan masyarakat kaganggu. Pramila Sdr. Bupati enggal tumindak kanthi cepet lan pas.
4. Tasih ing babagan pemerintahan desa, sebagian ageng pamarentah desa dereng nindakake blak-blakan lan tanggel jawab (transparans lan

akuntabel) panggulawenthah Dana Desa, Alokasi Dana Desa utawi dana-dana sanesipun. Wonten ing panggenan strategis dereng kapasang papan pengumuman bab APB-Des (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Cathetan sanes: sawetawis wekdal kapengker Lurah Jawi Tengah, Bapak Ganjar Pranowo paring dhawuh dateng sedaya Kepala Desa sak Jawi Tengah ing tahun 2016 menika, supados gadhah "web site" desa kanthi pangajab program pembangunan desa lumampah kanthi blak-blakan lan tanggel jawab (transparan dan akuntabel), kangge ngendhani bab-bab ingkang mboten prayogi. Lha ngantos samangke meh sedaya desa ing tlatah Rembang dereng mbikak "web site" desa kasebat. Pramila menika kula nyuwun dhateng Sdr. Bupati mrentahaken Kepala Desa ing tlatah Rembang enggal mbikak "web site" desa. Kosok wangsulipun pamarentah ugi kedah aktif ngginakaken media sosial kangge mbiyawaraken programipun dhateng masyarakat, nanging miturut panalisik kawula web site rembangkab.go.id dalah anakipun mboten aktif dipun up-date dening para SKPD.

5. Adhedhasar penjelasan saking SKPD nalika rapat kerja kalian Komisi DPRD, tasih kekurangan SDM (sumberdaya manusia) utaminipun tenaga teknis pengadaan barang lan jasa, saengga nyandhet lampah kegiatan ing SKPD kasebat. Pramila kawula nyuwun supados kekurangan SDM kasebat enggal dipun cekapi.
6. Ing babagan pelayanan kesehatan, wekdal menika tasih kathah masyarakat kirang mampu ingkang dereng saged dipun layani program BPJS, kawula nyuwun supados Pemkab Rembang enggal nuntasaken bab menika lumantar progam PBI (Penerima Bantuan Iuran) saengga wonten ing Rembang mboten wonten malih guyonan "orang miskin dilarang sakit".
7. Magepokan kalian wontenipun Akademi Komunitas Negeri (AKN), tahun 2016 menika AKN kedah mandiri antawisipun kedah saged pikantuk 100 mahasiswa enggal. Fraksi Karya Sejahtera nyuwun dhumateng Sdr. Bupati supados ngupadi wujuding syarat menika kanthi ngajak maneka

pihak, ngengeti perjuangan ngedegaken AKN menika sampun ngedalaken tenaga, pikiran lan dana ingkang mboten sekedhik lumantar ~~dan~~ APBD lan APBN.

8. Adhedhasar LHP BPK, pemerintah saged kecalan pendapatan daerah krana lelang tertutup ingkang dipun tindakaken ing TPI Tasikagung 2, agengipun Rp. 2.425.702.426,-. Pramila kawula angajab dhumateng Pemerintah Kabupaten Rembang supados mirsani malih sistem lelang tertutup ing TPI Tasikagung 2, TPI Tanjungsari, TPI Pasarbanggi, TPI Karanglincak saha TPI Pangkalan.
9. Kanthi larangan kapal cantrang wiwit wulan Desember 2016 mangke, kawula angajab dhumateng Pemerintah Kabupaten Rembang ngupadi solusi ingkang ces-pleng supados para kadang nelayan Rembang mboten rugi.
10. Kanthi lumampahing wekdal, kadang tani ing Rembang tansah dados pihak ingkang rugi krana ngalami gagal panen lan mboten saged anikmati reregan asil tetanenipun. Supados mboten kawangsulan malih, kawula nyuwun supados lintas SKPD lan pihak sanesipun kanthi komando Sdr. Bupati ngawontenaken koordinasi kanthi sae.
11. Sak indenging tlatah Rembang, wekdal menika sumebar puluhan pasar alit (mini market), miturut informasi wonten 5 pasar alit ingkang dereng gadhah ijin, ngengingi bab menika Pemkab Rembang supados enggal nindakaken langkah tegas sak derengipun kedadosan ingkang mboten sae.
12. Wekdal menika kita mlebet ing jaman "social media" antawisipun face book, massenger, whatsapp (WA), tweeter lan sanesipun. Masyarakat migunakaken medsos (media sosial) kangge ngudhar gagasan, arupi gagasan majengaken dhaerah, atur pamanggih katur pamarentah, atur kritik kebijaksanaan pemerintah lan sanesipun. Pamarentah kasuwun mboten alergi utawi nutup netra lan talingan atas pamanggih lan kritik menika, pamarentah sak mangke sanes "menara gading" ingkang mboten saged kasenggol sok sintena. Awit saking menika, Fraksi Karya Sejahtera ngajak kita sedaya preduli dhumateng "detak jantung" masyarakat kasebat.

Makaten, kanti cathetan cathetan wau, Fraksi Karya Sejahtera setuju RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015 Kab Rembang dipun tetepaken dados PERDA APBD TA 2015 Kab Rembang.

Sadherek Bupati, anggota Dewan saha para rawuh.

Sak derengipun mandhap saking mimbar, kepareng kula nyuplik piweling saking tiyang sepuh kala semanten:

“Kahanan ndonya iki ora langgeng , tansah mobah mosik. Yen sira lagi ketunggon bandha lan kasinungan pangkat, aja banjur rumangsa “*sapa sira sapa ingsun*” tansah ngendelake panguwasa, tumindak deksura marang sapadha-padha. Elinga yen bandha iku gampang sirna, pangkat lan drajat bisa oncat ing saben wayah”.

Bahasa Indonesia: “Keadaan dunia ini tidak pernah tetap, selalu berubah. Kalau sedang ditunggu kekayaan dan pangkat derajat, jangan pernah merasa “siapa kamu siapa saya”, selalu menunjukkan kekuasaannya, bertindak semaunya pada sesama. Ingatlah kalau harta itu mudah habis, pangkat dan jabatan bisa lepas sewaktu-waktu”.

Ing wasana, mbok bilih wonten klenta-klentuning atur utawi mboten rena ing penggalih, kawula nyuwun gunging samodra pangaksami. Mugi-mugi Gusti Alloh tansah paring kekiatan lan berkah kangge kita sedaya ndalemnglampahi jebibahan ambangun Kabupaten Rembang, rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,


H. ISMARI, SH

Sekretaris,



H. JOKO SUPRIHADI, SH

**FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2015**

Dibacakan Oleh : Nur Jannah

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab.
Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2015 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan diskursus yang berkembang saat pembahasan di Komisi ataupun Badan Anggaran, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

1. Kami mengharapkan Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, sehingga dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Pertanggungjawaban yang kami harapkan tentunya tidak sebatas kuantitatif saja, tetapi juga secara kualitatif dapat dipertanggungjawabkan pula.
2. Mengingat Belanja Pegawai kita masih tinggi (Rp. 113.995.499.657,00), kami mengharapkan Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerja pegawai sehingga beban belanja yang sangat besar tersebut secara signifikan dapat menunjang peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Daerah. Bagaimanapun Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor dominan dalam pembangunan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan dan kami mensepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 ini ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 28 Juli 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua



SUKARMAIN



Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Tanggal, 28 Juli 2016**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

26 Rebo mendas.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur ***Alhamdulillah*** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Terakhir DPRD, dalam rangka ***"Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015"*** dalam keadaan sehat wal'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini ijinilah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu sesuai dengan arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan Legeslatif, maka akhir Tahun Anggaran 2015, kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, seperti

yang telah kami sampaikan pada sidang pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 lalu, yang merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran, sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Seperti yang telah kami sampaikan pada pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, bahwa dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.455.130.917.329,00 (Satu trilyun empat ratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.408.950.534.485,80 (Satu trilyun empat ratus delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta lima

ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh rupiah) atau 96,83%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.650.799.417.663,00 (Satu trilyun enam ratus lima puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) direalisasikan sebesar Rp. 1.211.257.900.367,74 (Satu trilyun dua ratus sebelas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah) atau 73,37%.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 206.340.500.334,00 (Dua ratus enam milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) realisasinya sebesar Rp.209.585.690.530,55 (Dua ratus sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh koma lima puluh lima rupiah) atau 101,57%. Dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 10.672.000.000,00 (Sepuluh milyar

Pembayaran 376 M.

5

enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) realisasinya sebesar Rp. 10.670.450.843,00 (Sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua empat ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 99,99%.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Laporan keterangan pertanggung jawaban yang saya sampaikan ini merupakan gambaran umum pelaksanaan program prioritas dan strategis selama tahun anggaran 2015 dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami menyampaikan **ucapan terima kasih** kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan buah karya dan hasil kerja keras kita bersama. semoga amal ibadah saudara dan kita semua akan mendapat imbalan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir Rapat Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat (1) huruf (d) Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 28 Juli 2016 ; .
2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 Juli 2016;
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 Juli 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang ;
- KETIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Juli 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua



GUNASIH, S.E.



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 1404 / 2016

NOMOR : 900 / 11601 / 2016

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015
MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juli** **Dua Ribu Enam Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang , dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H.MAJID KAMIL MZ** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
3. **H.GUNASIH,S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **M.BISRI CHOLIL.L** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
5. **SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah .
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ



WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG


SUMARSIH